

**ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik*

Oleh

RISWITA MULIANI

1520050031



**PROGRAM STUDI MAGSITER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2012-2016**

ABSTRAK

**RISWITA MULIANI
1520050031**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa dengan menggunakan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja, kemudian mengukur tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Langsa melalui Share dan Growth, dan Peta Kemampuan Keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016. Metode pengumpulan data yang digunakan, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa pada Rasio Kemandirian tergolong rendah, dimana tingkat pencapaian rata-rata sebesar 12,59%. Pada Rasio Ketergantungan kinerja keuangan masuk dalam kriteria sangat tinggi, dengan rata-rata sebesar 88,99%. Kinerja keuangan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi masuk dalam kriteria kurang, dimana diperoleh hasil rata-rata sebesar 11,01%. Kemudian pada Rasio Efektivitas kinerja keuangan masuk dalam kriteria cukup efektif, dimana perolehan rata-rata sebesar 86,21%. Selanjutnya pada Rasio Efisiensi kinerja keuangan tergolong efisien, dengan rata-rata sebesar 10,38% dan berdasarkan Rasio Keserasian Belanja pada Rasio Belanja Tidak Langsung memperoleh rata-rata sebesar 85,48%, sedangkan pada Rasio Belanja Langsung memperoleh rata-rata sebesar 60,40%. Tingkat kemampuan keuangan melalui share dan growth dan pemetaan kemampuan keuangan daerah tahun 2012-2016 posisi Pemko Langsa berada pada Kuadran II, yaitu kondisi yang belum ideal. Pada Pemerintah Kota Langsa pendapatan belum mencapai target yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah hanya sebesar 11,00%. Kemudian meningkatnya belanja daerah Kota Langsa disebabkan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai, yaitu sebesar 90,37% dan belanja modal sebesar 46,63%.

Kata kunci : *Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah.*

**ANALYSIS OF FINANCIAL RATIO OF REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGETS TO ASSESS REGIONAL GOVERNMENT
FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LANGSA CITY
IN BUDGET YEAR 2012-2016**

ABSTRACT

**RISWITA MULIANI
1520050031**

This study aims to describe the financial performance of the City of Langsa by using the Independence Ratio analysis, Dependency Ratio, Decentralization Degree Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Shopping Harmony Ratio, then measuring the financial capability of the Langsa City Government through Share and Growth, and Capability Map Finance.

This research is a qualitative descriptive study with the object under study is the Data of the Realization of the City of Langsa Revenue and Expenditure Budget for the 2012-2016 Budget Year. Data collection methods used are through interviews, observation, and documentation.

The results of the study from 2012-2016 showed that the Independence Ratio was low, where the average achievement rate was 12.59%. In the ratio of financial performance dependency is included in the criteria is very high, with an average of 88.99%. Financial performance based on the Decentralization Degree Ratio is included in the criteria of lacking, where the average yield is 11.01%. Then on the Effectiveness Ratio, financial performance is included in the criteria quite effective, where the average acquisition is 86.21%. Furthermore, the ratio of financial performance efficiency is classified as efficient, with an average of 10.38% and based on the ratio of shopping compatibility in the indirect shopping ratio, the average is 85.48%, while the direct expenditure ratio reaches an average of 60, 40%. The level of financial ability through share and growth and mapping of regional financial capabilities in 2012-2016 the position of PemkoLangsa is in Quadrant II, which is an ideal condition. In the Langsa City Government, revenue has not reached the target due to the low local revenue of only 11.00%. Then the increase in regional expenditure in Langsa City is caused by the large costs incurred for employee expenditure which is equal to 90,37% and capital expenditure of 46,63%.

Keywords: *Regional Financial Ratios, Regional Financial Performance.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suriteladan bagi kita semua.

Penelitian tesis ini berjudul “ **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016**“, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada program strata dua, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan bias selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati terimakasih secara khusus peneliti haturkan kepada :

Teristimewa buat Ayahanda H. Ri. Ismit Ismail, SH., MM dan Ibunda Hj. Ratnawati, S.pd tercinta yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus dalam mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan moral, materil serta nasehat sehingga peneliti menjadi kuat dan tabah dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh cobaan ini. Oleh karena itu peneliti berdoa

kepada Allah SWT agar Ayahanda dan Ibunda tetap mendapat tuntunan, petunjuk, kemudahan, kesehatan dan tetap bersikap qonaah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Serta abang dan kakak kandung peneliti yang telah banyak membantu peneliti dalam terselesaikannya studi penelit serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Bapak Dr. Bastari M, SE., M.M.,BKP,selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Maya Sari, SE., Ak., M.Si.,CA, selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu peneliti dalam ha lmemberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dorongan semangat untuk kesempurnaan penulisan ini. Untuk itu atas segala bimbingan, petunjuk, saran dan dorongan semangatnya, penulisan ini dapat diselesaikan dengan maksimal dan kepada Allah SWT peneliti berdoa semoga Bapak dan Ibu pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalan hidup dan kehidupan serta tugas-tugasnya.

Ucapan terimakasih juga penelitu capkan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Pps Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Junaina Alsa, Apt., MM, selaku Sekretaris Pps Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Widia Astuty. SE., M.Si., QIA., Ak., CA., CPAI., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Sekertaris Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak/ibu dosen beserta pegawai Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman mahasiswa Maksi UMSU angkatan 2016, terimakasih untuk segalanya, semangatnya, dukungan, sendagurau dan candatawanya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penelitisebutkansatu per satu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil.

Akhirnya peneliti berharap tesis ini semoga bermanfaat untuk pihak yang akan melakukan penelitian bidang yang samadan apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, peneliti mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan balasan yang berlipatatas segala budibaik mereka yang telah sudi member bimbingan kepad apeneliti. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Medan, Oktober 2018

Riswita Muliani

1520050031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	6
C. BatasandanRumusanMasalah	7
a. BatasanMasalah	7
b. RumusanMasalah	8
D. TujuandanManfaatPenelitian	8
a. TujuanPenelitian	8
b. ManfaatPenelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. UraianTeoritis	14
1. Kinerja Keuangan.....	14

1.1	Pengertian Kinerja Keuangan	14
1.2	Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja	15
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
2.1	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
2.2	Fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
2.3	Prinsip-prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	21
3.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
4.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
4.1	Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
4.2	Rasio Keuangan Daerah	26
4.3	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.....	33
B.	Penelitian Terdahulu.....	35
C.	Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Pendekatan Penelitian.....	42
B.	Definisi Operasional.....	42
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
D.	Jenis dan Sumber Data	47
E.	Teknik Pengumpulan Data	47
F.	Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
A.	Hasil Penelitian	50
1.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	50

2.	Penilaian Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Daerah Menggunakan Rasio Keuangan	52
3.	Data Keuangan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	53
4.	Perhitungan Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Langsa	57
4.	Perhitungan Kinerja PAD melalui ukuran <i>SharedanGrowth</i>	71
B.	Pembahasan	76
1.	Analisis Kinerja Keuangan APBD Kota Langsa Menggunakan Rasio Keuangan	76
2.	Analisis Penyebab Pendapatan Daerah Beberapa Tahun Belum Mencapai Target Yang Dianggarkan Dalam APBD Kota Langsa	102
3.	Analisis Penyebab Meningkatnya Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2012-2016 Pada Pemko Langsa	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		118
1.	Kesimpulan.....	118
2.	Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Laporan Realisasi Anggaran APBD kota Langsa	4
Tabel II-1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	27
Tabel II-2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah	29
Tabel II-3 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	29
Tabel II-4 Kriteria Pengukuran Efektivitas	30
Tabel II-5 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	31
Tabel II-6 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	35
Tabel II-7 Penelitian Terdahulu	35
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	44
Tabel IV-1 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Langsa Periode 1 Januari s.d Desember 2012	53
Tabel IV-2 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Langsa Periode 1 Januari s.d Desember 2013	54
Tabel IV-3 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Langsa Periode 1 Januari s.d Desember 2014	55
Tabel IV-4 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Langsa Periode 1 Januari s.d Desember 2015	56
Tabel IV-5 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Langsa Periode 1 Januari s.d Desember 2016	57
Tabel IV-6 Rasio Kemandirian APBD kota Langsa	59

Tabel IV-7 Rasio Ketergantungan Daerah APBD kota Langsa	61
Tabel IV-8 Rasio Derajat desentralisasi APBD kota Langsa	63
Tabel IV-9 Rasio Efektivitas PAD kota Langsa	65
Tabel IV-10 Rasio Efisiensi PAD kota Langsa	67
Tabel IV-11 Rasio Belanja Tidak Langsung APBD kota Langsa	69
Tabel IV-12 Rasio Belanja Langsung APBD kota Langsa	71
Tabel IV-13 Share APBD kota Langsa tahun 2012-2016.....	72
Tabel IV-14 Growth APBD kota Langsa tahun 2012-2016.....	73
Tabel IV-15 Share dan Growth kota Langsa	74
Tabel IV-16 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	74
Tabel IV-17 Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah	76
Tabel IV-18 Persentase Rasio Kemandirian APBD kota Langsa	77
Tabel IV-19 Kontribusi Jenis PAD Terhadap PAD Pada APBD kota Langsa Tahun 2012-2016	80
Tabel IV-20 Kontribusi Jenis PAD Terhadap PAD Pada APBD kota Langsa Tahun 2012-2016	81
Tabel IV-21 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Kota Langsa Tahun 2012	82
Tabel IV-22 Persentase Rasio Ketergantungan Daerah APBD Kota Langsa	85
Tabel IV-23 Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Pada APBD Kota Langsa Tahun 2012-2016	88
Tabel IV-24 Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Pada	

APBD Kota Langsa Tahun 2012-2016	89
Tabel IV-25 Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Hasil Retribusi Daerah Kota Langsa Tahun 2012	90
Tabel IV-26 Persentase Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Langsa	92
Tabel IV-27 Persentase Rasio Efektivitas APBD Kota Langsa	95
Tabel IV-28 Persentase Rasio Efisiensi APBD Kota Langsa	97
Tabel IV-29 Persentase Rasio Keserasian Belanja APBD Kota Langsa	100
Tabel IV-30 Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Langsa Tahun 2012-2016	102
Tabel IV-31 Kontribusi dari Jenis Pendapatan APBD Kota Langsa Tahun 2012-2016	103
Tabel IV-32 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2016	106
Tabel IV-33 Kontribusi Jenis Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada APBD kota Langsa Tahun 2012-2016	108
Tabel IV-34 Kontribusi Jenis Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Langsa Tahun 2012-2016	110
Tabel IV-35 Kontribusi Jenis Belanja Langsung Terhadap Belanja Langsung Kota Langsa Tahun 2012-2016	112
Tabel IV-36 Kontribusi Jenis Belanja Pegawai Terhadap Belanja Pegawai Kota Langsa Tahun 2012-2016	114
Tabel IV-37 Kontribusi Jenis Belanja Modal Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Tahun 2012-2016	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 PetaKemampuanKeuanganBerdasarkanMetodeKuadran	34
Gambar II.2Kerangka Berpikir	39
Gambar IV-1 PetaKemampuanKeuangan Daerah Kota Langsa	75
Gambar IV.2Pertumbuhan Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan DaerahAP BD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	78
Gambar IV-3 Pertumbuhan Kinerja Rasio Ketergantungan Daerah APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	86
Gambar IV-4 Pertumbuhan Kinerja Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	93
Gambar IV-5 Pertumbuhan Kinerja Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	96
Gambar IV-6 Pertumbuhan Kinerja Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	98
Gambar IV-7 Pertumbuhan Kinerja Rasio Keserasian Belanja APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio ketergantungan daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja. (Abdul Halim, 2008:230). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu

alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil alih terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim, 2002:126) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berikut ini disajikan data APBD tahun 2012 sampai 2016 yang di dapat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa :

Tabel I-1
Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	PENDAPATAN		BELANJA	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2012	470.985.346.660	466.011.853.327	453.385.670.047	426.160.276.684
2013	568.604.409.638	560.021.241.915	576.541.156.997	545.553.087.985
2014	751.849.914.120	756.493.119.913	777.795.742.070	729.568.321.376
2015	818.157.958.122	788.891.524.132	870.341.493.208	788.712.999.182
2016	1.064.839.552.341	984.060.051.478	1.109.385.442.250	998.271.053.424

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa dapat diketahui bahwa selamaturunwaktu 5 (lima) tahunrealisasi pendapatan daerahbeberapatahunmasih belum mencapaitarget pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa. Kemudianpada realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahunmengalami peningkatan belanja daerah setiap tahunnya. Laporan realisasi anggaran merupakan pengungkapan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.Laporanrealisasianggaranmenyajikanikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaansumberdayaekonomi yang dikelolaolehpemerintahpusat/daerahdalam satuperiodepelaporan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan,

sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembawa laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Menurut Abdul Halim (2007:230), Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut Abdul Halim (2016:140), salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Langsa adalah dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio ketergantungan daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio

Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang di capai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016"**.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:

1. Realisasi Pendapatan daerah beberapa tahun belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa.
2. Terjadinya peningkatan realisasibelanja daerah Kota Langsasetiap tahunnya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah.

a. Batasan Masalah.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa pada tahun anggaran 2012-2016. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa hanya menggunakan 6 rasio yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Kemudian dari keseluruhan perhitungan dibuatlah grafik untuk mempermudah penarikan kesimpulan secara deskriptif berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa pada tahun anggaran 2012-2016.

b. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Langsa berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja selama tahun anggaran 2012-2016 ?
2. Apakah penyebab pendapatan daerah beberapa tahun belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa ?
3. Apakah penyebab meningkatnya belanja daerah pada tahun anggaran 2012-2016 pada Pemerintah Daerah Kota Langsa ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa yang berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja selama tahun anggaran 2012-2016.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pendapatan daerah beberapa tahun belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya belanja daerah pada tahun anggaran 2012-2016 pada pemerintahan daerah Kota Langsa.

b. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut ini :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kota Langsa dari waktu ke waktu selama periode 5 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa.

c. Bagi Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

d. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana cara menghitung analisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Langsa dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian tentang analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joko Pramono(2014)dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah kota surakarta) dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio

Pertumbuhan sebagai variabel penelitian dan hasil penelitian dituliskan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Hasil yang diperoleh adalah penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. Selanjutnya penelitian Anim Rahmayati (2016) dengan judul Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2011-2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kabupaten sukoharjo untuk belanja operasi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitri Umi Hanik (2014) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Semarang) dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah sebagai variabel penelitian dan hasil penelitian dituliskan bahwa kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Listiyani Natalia (2015) yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Variabel yang digunakan adalah Laporan Keuangan dan hasil dari penelitian tersebut adalah pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran, namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mentari Yosephe Sijabat (2013) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012), hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sopiha (2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2011-2015 menggunakan analisis rasio keuangan, hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan masih tergolong sedang. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh Astriana Nabila Muhibtari (2014) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kota Magelang berada pada kriteria instruktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti menambahkan periode penelitian dan rasio keuangan yang digunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus di junjung tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis.

1. Kinerja keuangan.

1.1 Pengertian kinerja keuangan.

Menurut Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas sasaran perusahaan.

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sedangkan menurut Sawir (2003:144), dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standar rasio keuangan tersebut. Menurut Yuwono, Sukarno, dan Ichsan (2003:31), dengan adanya standar rasio keuangan, perusahaan dapat menentukan apakah kinerja keuangannya baik atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan

membandingkan rasio keuangan yang diperoleh dengan standar rasio keuangan yang ada. Pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik jika besarnya rasio keuangan perusahaan bernilai sama dengan atau di atas standar rasio keuangan.

Pengukuran kinerja merupakan faktor yang penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.

“Menurut Mardiasmo (2009), Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ukuran kinerja sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.”

1.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002:121), adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Abdul Halim (2002:126), hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Manfaat pengukuran kinerja keuangan menurut Ihyahul Ulum (2004:277), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009:119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan

Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan

dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak tersedia dalam anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.2 Fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otoritasi.

Fungsi Otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD.

2. Fungsi Perencanaan.

Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi.

Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi.

Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilitas.

Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3 Prinsip-prinsip Anggaran Daerah.

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang sebagaimana bunyi penjelasan dalam berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

1. Kesatuan, Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari Kas Daerah.

3.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai. Menurut Mahmudi (2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.

3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a. Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak PEMDA, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu:
 1. Pendapatan Asli Daerah.
 2. Dana Perimbangan.
 3. Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan

diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Belanja aparatur daerah.
2. Belanja Pelayanan Publik.
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:

1. Sumber penerimaan daerah, yaitu:

- a. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
- b. Penerimaan pinjaman dan obligasi.
- c. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- d. Transfer dari dana cadangan.

2. Sumber Pengeluaran daerah, yaitu:

- a. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
- b. Penyertaan modal.
- c. Transfer ke dana cadangan.
- d. Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2. Neraca.

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, Laporan Realisasi Anggaran, maupun Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun darimasyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008).

Menurut Wachid (2014: 2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitukeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

4.2 Rasio Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat

dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2008:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Mahmudi (2010) Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Langsa adalah dengan menggunakan Rasio

Kemandirian Keuangan, Rasio ketergantungan daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja. (Abdul Halim, 2016:140).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2008:228) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel II-1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim, 2008

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.
 - b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
 - c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- b. Rasio Ketergantungan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. (Mahmudi, 2010:142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II-2
Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah

Presentase	Ketergantungan keuangan daerah
0,00 -10,00	Sangat rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

Sumber: Mahmudi, 2010

c. Rasio Desentralisasi Fiskal.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Derajat Desentralisasi Fiskal= _____

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II-3
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi, 2010

d. Rasio Efektivitas PAD.

Menurut Halim (2008:232) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasioefektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel II-4
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

e. Rasio Efisiensi PAD.

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik (Abdul Halim 2008). Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan

pendapatandikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 10%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi PAD merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran efisiensi menurutMahmudi (2009:143), tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Berikut kriteria pengukuran efisiensi :

Tabel II-5
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
> 40%	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi, (2010:143)

f. Rasio Keserasian Belanja.

Rasio Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distrib Total Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah x 100% dengan baik, maka Pemerintal isasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain:

$$\text{Rasio Belanja TL terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/ expenditure*), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

4. 3 AnalisisKemampuanKeuangan Daerah.

Melihat kemampuan keuangan daerah di awal dengan perhitungan *share* dan *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran. Adapun cara untuk menghitung *share* dan *growth* adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan *Share* dan *Growth*.

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PAD_i}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

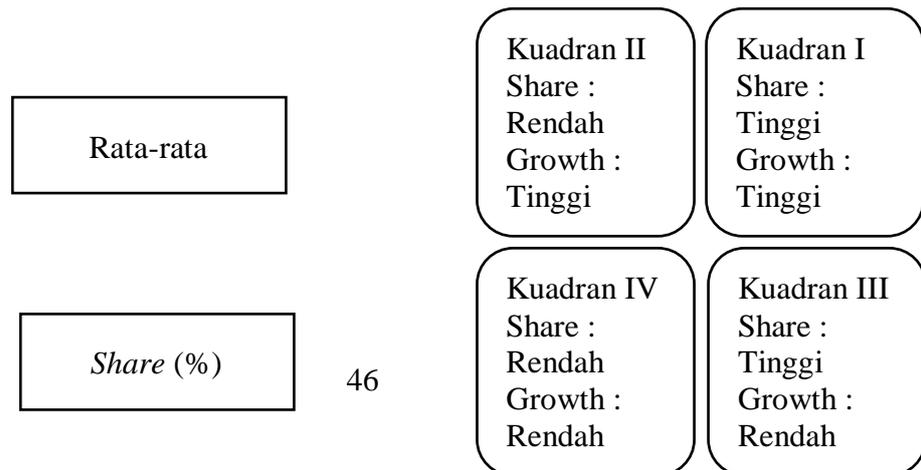
Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode yang sekarang.

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode yang lalu.

b. Peta Kemampuan Keuangan.

Dari perhitungan yang di ukur dengan *share* dan *growth* kemudian diklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran berikut ini :



Gambar II.1 PetaKemampuanKeuanganBerdasarkanMetodeKuadran Rata-rata *Growth* (100%)

MetodeKuadran

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

B. Penelitian Terdahulu.

Adapun referensi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

**Tabel II-7
Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian data	Sumber
1	Joko Pramono (2014)	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah	Variabel yang digunakan adalah Rasio keuangan daerah	Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang	Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014

Lanjutan Tabel 2.7		daerah (studi kasus pada pemerintah kota surakarta)		masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian.	
2	Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2016)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Di kabupaten jembrana tahun 2010-2014	Variabel yang digunakan adalah Kinerja Anggaran Pendapatan dan Kinerja Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.	E-journal bisma universitas pendidikan ganesha Jurusan manajemen (volume 4 tahun 2016)
3	Anim Rahmayati (2016)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo Tahun anggaran 2011-2013	Varibel yang digunakan adalah Kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien,	Jurnal eka cida vol. 1 no. 1 maret 2016 Issn: 2503-3565 e-issn: 2503-3689

				tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kabupaten sukoharjo untuk belanja operasi.	
Lanjutan Tabel 2.7					
4	Fitri Umi Hanik (2014)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)	Variabel yang digunakan adalah Rasio keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwakinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik	JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014
5	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Variabel yang digunakan adalah Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran, namun ketergantungan pemerintah daerah Terhadap Pemerintah	Jurnal SosioHumaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015

				Pusat masih tinggi.	
6	Mentari Yosephen Sijabat (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)	Variabel yang digunakan adalah Kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu, kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 .2013
7	Sopiah (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2011-2015 menggunakan analisis rasio keuangan	Variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah	hasil yang diperoleh menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan masih tergolong sedang.	TESIS
8	Astria Nabila Muhibtari (2014)	Analisis Rasio Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	Variabel yang digunakan adalah rasio keuangan daerah	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kota Magelang berada pada kriteria	TESIS

Lanjutan Tabel 2.7

				instruktif.	
--	--	--	--	-------------	--

Sumber :HasilPenelitian, data diolah.

C. Kerangka Berpikir.

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai telah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sektor publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

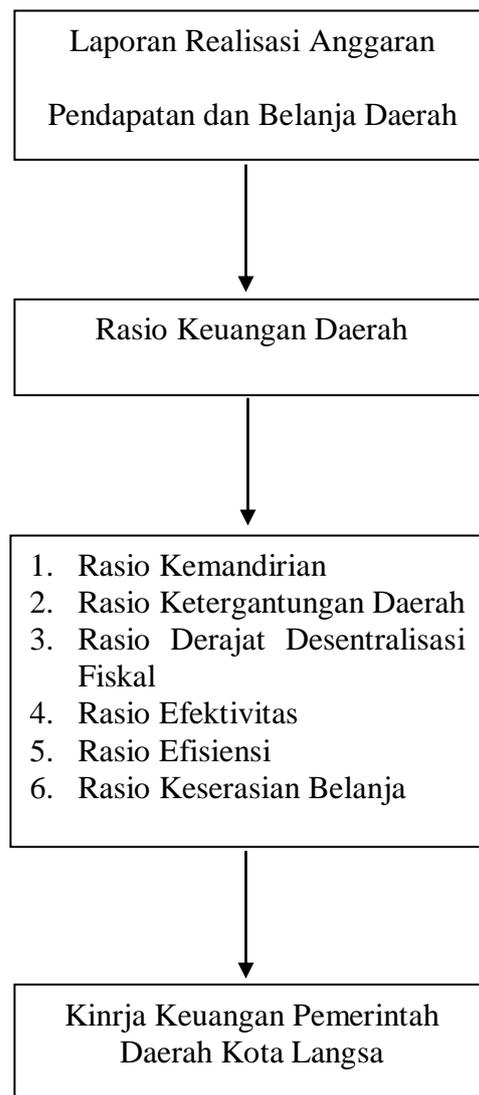
Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis rasio tersebut dapat dijadikan tolak ukur apakah kinerja Pemerintah Daerah meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 dan akan dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja. Di mana perhitungan analisis ini akan digunakan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Langsa

yang kemudian akan disimpulkan dengan cara melihat grafik perbandingan rasio-rasio dari setiap periode selama 5(lima) tahun.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar II.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan gambaran atau lukisan secara faktual mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya terhadap kinerja pemerintah Daerah Kota Langsa. Kemudian peneliti mengumpulkan, mengklasifikan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi dan membandingkan pengetahuan taknis dengan keadaan yang sebenarnya untuk mengambil kesimpulan. Dengan fokus penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa.

B. Definisi Operasional.

Definisi operasional penelitian ini adalah rasio keuangan yang merupakan konsep pengukuran kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdasarkan pada lima rasio keuangan, berikut ini uraian variabelnya yaitu :

1. Rasio kemandirian.

Abdul Halim (2008:228) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

$$\text{RasioKemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjamar.}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. (Mahmudi, 2010:142). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Desentralisasi Fiskal.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio efektivitas PAD.

Abdul Halim (2008:232) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio efisiensi PAD.

Rasio Efisiensi PAD adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik (Abdul Halim 2008). Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

6. Rasio Keserasian Belanja.

Rasio Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain:

$$\text{Rasio Belanja TL terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 19, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24375. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan selesai, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017																2018											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																												
3	Kolokium																												
4	Penyusunan Tesis																												
5	Seminar Hasil																												
6	Penyempurnaan Tesis																												
7	Sidang Meja Hijau																												

D. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan bagian akuntansi dan keuangan yang ada di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara.

Dalam teknik ini dilakukan wawancara langsung pada bagian keuangan daerah yang berkenaan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016.

2. Teknik Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian.

3. Teknik dokumentasi.

Dokumentasi yaitu berupa data-data yang diperlukan seperti Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016.

F. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun anggaran 2012-2016. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Langsa tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah dilakukan dengan dengan mengukur Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio ketergantungan daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,

Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja.

3. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode.
4. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan atau dengan melihat grafiknya.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

G. Hasil Penelitian.

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.

a. Letak Geografis.

Kota Langsa memiliki luas 26.241 hektar (262,41 km²), yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98° 04' 42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0-25 m diatas permukaan laut serta memiliki batas-batas wilayah, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang

kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

b. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kota Langsa mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Tugas Pokok.

Pemerintah daerah kota Langsa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa No. 68 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Langsa, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

b. Fungsi.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
4. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah dan fungsinya.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Penilaian Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menggunakan Rasio Keuangan Daerah.

Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja yang digunakan dengan rumus, kemudian hasil dari perhitungan tersebut akan di analisis sesuai dengan karakteristik penilaian kinerja keuangan sehingga akan diperoleh nilai dari hasil pencapaian kinerja keuangan tersebut. Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja merupakan variabel utama dalam penelitian ini dan juga alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan organisasi sektor publik. Dana penelitian diambil pada Pemerintah Daerah Kota Langsa melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2012-2016 dan hasil wawancara yang dilakukan pihak-pihak terkait yang digunakan sebagai data pendukung.

Laporan Realisasi Anggaran adalah suatu bentuk laporan yang berisi informasi tentang total pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terealisasi sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tertentu.

**3. Data Keuangan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Adapun rincian data dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut :

**Tabel IV-1
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Langsa
Periode 1 Januari s.d Desember 2012**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	470.985.346.660	466.011.853.327
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.464.721.911	16.666.942.465
Pendapatan Pajak Daerah	5.222.137.932	5.098.488.603
Hasil Retribusi Daerah	29.119.647.916	10.627.280.066
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	300.000.000	267.347.897
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	822.936.063	673.825.899
DANA PERIMBANGAN	394.244.876.058	395.534.269.334
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.275.748.691	53.810.641.527
BELANJA	453.385.670.077	426.160.276.684
BELANJA TIDAK LANGSUNG	280.199.702.897	276.157.535.899
Belanja Pegawai	264.431.736.769	261.349.233.750
Belanja Bunga	379.000.000	378.625.752
Belanja Hibah	10.523.635.128	9.747.967.397
Belanja Bantuan Sosial	3.353.331.000	3.179.331.000
Belanja Tidak Terduga	250.000.000	240.385.000
Belanja Bantuan Keuangan	1.262.000.000	1.261.993.000
BELANJA LANGSUNG	173.185.967.180	150.002.740.785
Belanja Pegawai	28.489.205.620	23.978.992.023
Belanja Barang dan Jasa	58.103.777.970	51.022.378.369
Belanja Modal	86.592.983.590	75.001.370.393
SURPLUS/DEFISIT	17.599.676.583	39.851.576.642

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Selanjutnya rincian data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel IV-.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Langsa
Periode 1 Januari s.d Desember 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	568.604.409.638	560.021.241.915
PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.236.271.011	57.243.381.959
Pendapatan Pajak Daerah	5.729.914.000	6.109.180.218
Hasil Retribusi Daerah	8.600.083.229	5.206.868.353
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	413.617.460	363.617.460
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.492.656.322	45.563.715.928
DANA PERIMBANGAN	443.922.034.879	445.928.780.151
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.446.103.748	56.849.079.804
BELANJA	576.541.156.997	545.553.069.011
BELANJA TIDAK LANGSUNG	323.183.543.131	306.430.153.300
Belanja Pegawai	301.045.712.131	286.276.108.300
Belanja Hibah	1.051.767.000	1.016.767.000
Belanja Bantuan Sosial	8.710.464.000	7.929.064.000
Belanja Tidak Terduga	739.000.000	89.770.000
Belanja Bantuan Keuangan	11.636.600.000	11.118.444.000
BELANJA LANGSUNG	253.357.613.866	239.122.915.711
Belanja Pegawai	56.123.267.700	50.950.779.288
Belanja Barang dan Jasa	70.555.539.233	68.610.678.567
Belanja Modal	126.678.806.933	119.561.457.856
SURPLUS/DEFISIT	(7.936.747.358)	14.468.172.904

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Kemudian rincian data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel IV-3
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Langsa
Periode 1 Januari s.d Desember 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	751.849.914.120	756.493.119.913
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.021.202.287	114.168.702.058
Pendapatan Pajak Daerah	7.494.319.000	9.400.051.991
Hasil Retribusi Daerah	13.718.522.158	12.800.842.081
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	391.835.870	397.301.824
Penerimaan Zakat, Infaq dan sadaqah	1.400.000.000	2.082.469.922
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.016.525.259	89.488.036.240
DANA PERIMBANGAN	477.056.552.547	479.418.226.550
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169.772.159.286	162.906.191.305
BELANJA	777.795.742.070	729.568.321.376
BELANJA TIDAK LANGSUNG	374.065.485.824	342.054.327.008
Belanja Pegawai	349.445.512.824	319.965.073.744
Belanja Hibah	4.010.000.000	3.825.892.264
Belanja Bantuan Sosial	7.519.773.000	6.740.133.000
Belanja Tidak Terduga	1.462.600.000	460.400.000
Belanja Bantuan Keuangan	11.627.600.000	11.062.828.000
BELANJA LANGSUNG	403.730.256.246	387.513.994.368
Belanja Pegawai	106.044.975.518	103.738.098.668
Belanja Barang dan Jasa	141.897.604.147	134.441.518.332
Belanja Modal	155.787.676.581	149.334.337.367
SURPLUS/DEFISIT	(25.945.827.950)	26.924.798.537

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Berikutnya rincian data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Langsa
Periode 1 Januari s.d Desember 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	818.157.958.122	788.891.524.132
PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.529.994.341	109.116.860.676
Pendapatan Pajak Daerah	9.550.000.000	10.090.865.225
Hasil Retribusi Daerah	5.405.424.740	4.349.945.627
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	518.845.242	518.845.242
Penerimaan Zakat, Infaq dan sadaqah	2.191.549.393	2.474.092.143
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.864.174.966	91.706.324.970
DANA PERIMBANGAN	515.118.391.509	505.098.208.709
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	188.509.570.272	174.676.354.747
BELANJA	870.341.493.208	788.712.999.182
BELANJA TIDAK LANGSUNG	413.969.587.554	367.337.150.089
Belanja Pegawai	375.701.745.554	333.879.732.430
Belanja Hibah	1.825.000.000	1.825.000.000
Belanja Bantuan Sosial	2.913.557.000	2.645.229.000
Belanja Tidak Terduga	401.640.000	272.414.000
Belanja Bantuan Keuangan	33.127.645.000	28.714.674.659
BELANJA LANGSUNG	456.371.905.654	421.375.849.093
Belanja Pegawai	69.885.650.189	65.674.537.910
Belanja Barang dan Jasa	188.236.674.347	181.152.329.292
Belanja Modal	198.249.581.118	174.548.981.891
SURPLUS/DEFISIT	(52.183.535.086)	178.524.950

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dan selanjutnya rincian data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel IV-5
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Langsa
Periode 1 Januari s.d Desember 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	1.064.839.552.341	984.245.445.463
PENDAPATAN ASLI DAERAH	133.420.175.265	121.554.861.361
Pendapatan Pajak Daerah	11.100.000.000	10.855.975.158
Hasil Retribusi Daerah	6.324.574.550	4.565.564.364.383
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	518.845.242	515.564.364
Penerimaan Zakat, Infaq dan sadaqah	2.100.000.000	2.304.927.949
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.376.755.473	103.126.078.995
DANA PERIMBANGAN	727.738.311.990	656.804.723.246
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	203.681.065.086	205.885.860.856
BELANJA	1.109.385.442.250	998.271.053.424
BELANJA TIDAK LANGSUNG	482.341.404.572	447.584.048.569
Belanja Pegawai	389.406.426.875	355.119.475.382
Belanja Hibah	20.532.644.000	20.495.734.000
Belanja Bantuan Sosial	2.455.000.000	2.404.007.000
Belanja Tidak Terduga	350.000.000	103.762.500
Belanja Bantuan Keuangan	69.597.333.697	69.461.069.687
BELANJA LANGSUNG	627.044.037.678	550.687.004.855
Belanja Pegawai	70.348.793.703	66.068.722.406
Belanja Barang dan Jasa	202.144.489.948	109.238.299.684
Belanja Modal	354.550.754.027	294.379.982.765
SURPLUS/DEFISIT	(44.545.889.908)	(14.211.001.954)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

4. Perhitungan Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja

daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka perhitungan Rasio Kemandirian Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$
<p>2012 = $\frac{16.666.942.465}{395.534.269.334 + 53.810.641.527 + 0} \times 100\%$ = 3,71 %</p>
<p>2013 = $\frac{57.243.381.959}{445.928.780.151 + 56.849.079.804 + 0} \times 100\%$ = 11,38 %</p>
<p>2014 = $\frac{114.168.702.058}{479.418.226.550 + 162.906.191.305 + 0} \times 100\%$ = 17,77 %</p>
<p>2015 = $\frac{109.116.860.676}{505.098.308.709 + 174.676.354.747 + 0} \times 100\%$ = 16,05 %</p>
<p>2016 = $\frac{121.369.467.375}{656.804.723.246 + 205.885.860.856 + 0} \times 100\%$ = 14,07 %</p>

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Kemandirian Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-6
Rasio Kemandirian APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	16.666.942.465	449.344.910.861	3,71 %	Instruktif
2013	57.243.381.959	502.777.859.955	11,38 %	Instruktif
2014	114.168.702.058	642.324.417.855	17,77 %	Instruktif
2015	109.116.860.676	679.777.663.456	16,05 %	Instruktif
2016	121.369.467.375	862.690.584.102	14,07 %	Instruktif
Rata-rata			12,59 %	Instruktif

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa pada rasio kemandirian tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 naik sebesar 205,09% menjadi sebesar 11,38%, di tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 85,44% menjadi sebesar 17,77%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar -11,58% menjadi sebesar 16,05%, dan dari tahun 2015-2016 masih mengalami penurunan sebesar -14,41% menjadi sebesar 14,07%. Dengan rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 12,59%. Ini menunjukkan bahwa pola hubungan rasio kemandirian pada Pemerintah Daerah Kota Langsa tergolong Instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

b. Rasio Ketergantungan Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka perhitungan rasio

ketergantungan daerah pemerintah daerah kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
$2012 = \frac{449.344.910.861}{466.011.853.327} \times 100\%$ $= 96,42 \%$
$2013 = \frac{502.777.859.955}{560.021.241.915} \times 100\%$ $= 89,78 \%$
$2014 = \frac{642.324.417.855}{756.493.119.913} \times 100\%$ $= 84,91 \%$
$2015 = \frac{679.774.663.456}{788.891.524.132} \times 100\%$ $= 86,17 \%$
$2016 = \frac{862.690.584.102}{984.369.467.357} \times 100\%$ $= 87,67 \%$

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-7
Rasio Ketergantungan Daerah APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Daerah	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
2012	449.344.910.861	466.011.853.327	96,42 %	Sangat Tinggi
2013	502.777.859.955	560.021.241.915	89,78 %	Sangat Tinggi
2014	642.324.417.855	756.493.119.913	84,91 %	Sangat Tinggi
2015	679.777.663.456	788.891.524.132	86,17 %	Sangat Tinggi
2016	862.690.584.102	984.369.467.357	87,67 %	Sangat Tinggi
Rata-rata			88,99 %	Sangat Tinggi

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2012-2013 rasio ketergantungan daerah mengalami penurunan, dimana tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 turun sebesar -7,39% menjadi sebesar 89,78%, di tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar -5,74% menjadi sebesar 84,91%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,48% menjadi sebesar 86,17%, dan dari tahun 2015-2016 juga mengalami peningkatan sebesar 1,74% menjadi sebesar 87,67%. Dengan rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 88,99%. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota Langsa semakin tinggi terhadap penerimaan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

c. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam laporan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun 2012-2016, maka perhitungan rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kota

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2012} &= \frac{16.666.942.465}{466.011.853.327} \times 100\% \\ &= 3,58 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2013} &= \frac{57.243.381.959}{756.493.119.913} \times 100\% \\ &= 10,22 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2014} &= \frac{114.168.702.058}{984.369.467.357} \times 100\% \\ &= 15,09 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2015} &= \frac{109.116.860.676}{788.891.524.132} \times 100\% \\ &= 13,83 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2016} &= \frac{121.369.467.375}{984.369.467.357} \times 100\% \\ &= 12,33 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-8
Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
2012	16.666.942.465	466.011.853.327	3,58 %	Sangat Kurang
2013	57.243.381.959	560.021.241.915	10,22 %	Kurang
2014	114.168.702.058	756.493.119.913	15,09 %	Kurang
2015	109.116.860.676	788.891.524.132	13,83 %	Kurang
2016	121.369.467.375	984.369.467.357	12,33 %	Kurang
Rata-rata			11,01 %	Kurang

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2012-2013 rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 naik sebesar 185,47% menjadi sebesar 10,22%, di tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 47,65% menjadi sebesar 15,09%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar -8,35% menjadi sebesar 13,83%, dan dari tahun 2015-2016 masih mengalami penurunan sebesar -10,85% menjadi sebesar 12,33%. Dengan rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 11,01%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah kota Langsa kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi.

d. Rasio Efektivitas PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka perhitungan rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

	$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
2012	$= \frac{16.666.942.465}{35.464.721.911} \times 100\%$ $= 46,99 \%$
2013	$= \frac{57.243.381.959}{64.236.271.011} \times 100\%$ $= 89,11 \%$
2014	$= \frac{114.168.702.058}{105.021.202.287} \times 100\%$ $= 108,71 \%$
2015	$= \frac{109.116.860.676}{114.529.994.341} \times 100\%$ $= 95,27 \%$
2016	$= \frac{121.369.467.375}{133.420.175.265} \times 100\%$ $= 90,96 \%$

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-9
Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	RealisasiPenerimaan PAD	Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria Pengukuran Efektivitas
2012	16.666.942.465	35.464.721.911	46,99 %	Tidak Efektif
2013	57.243.381.959	64.236.271.011	89,11 %	Cukup Efektif
2014	114.168.702.058	105.021.202.287	108,71 %	Sangat Efektif
2015	109.116.860.676	114.529.994.341	95,27 %	Efektif
2016	121.369.467.375	133.420.175.265	90,96 %	Efektif
Rata-rata			86,21 %	Cukup Efektif

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio efektivitas PAD pertumbuhan tingkat kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 89,63% menjadi sebesar 89,11%, di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 21,99% menjadi sebesar 108,71%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar-12,36% menjadi sebesar 95,27%, dan dari tahun 2015-2016 masih mengalami penurunan sebesar-4,52% menjadi sebesar 90,96%. Dengan rata-rata Rasio Efektifitas PAD sebesar 86,21%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Langsacukup efektif dalam mengelola PAD nya.

e. Rasio Efisiensi PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Rasio Efisiensi PAD	=	$\frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$
2012	=	$\frac{485.713.695 + 485.173.695}{16.666.942.465} \times 100\%$ $= 5,83 \%$
2013	=	$\frac{333.718.881 + 333.718.881 + 302.172.880 + 302.172.880}{57.243.381.959} \times 100\%$ $= 2,22 \%$
2014	=	$\frac{589.394.880 + 589.394.880}{114.168.702.058} \times 100\%$ $= 1,03 \%$
2015	=	$\frac{623.940.000 + 623.940.000}{109.116.860.676} \times 100\%$ $= 1,14 \%$
2016	=	$\frac{465.946.365 + 465.946.365}{121.369.467.375} \times 100\%$ $= 0,77 \%$

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-10
Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kinerja
2012	971.427.390	16.666.942.465	5,83 %	Sangat Efisien
2013	1.271.783.522	57.243.381.959	2,22 %	Sangat Efisien
2014	1.178.789.760	114.168.702.058	1,03 %	Sangat Efisien
2015	1.247.880.000	109.116.860.676	1,14 %	Sangat Efisien
2016	931.892.730	121.369.467.375	0,77 %	Sangat Efisien
Rata-rata			10,38 %	Efisien

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio efisiensi PAD dari tahun 2012-2016 berfluktuatif. Dimana tingkat pertumbuhan rasio efisiensi PAD dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar -61,92% menjadi sebesar 2,22%, di tahun 2014 masih mengalami penurunan sebesar -53,60% menjadi sebesar 1,03%, di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 10,68% menjadi sebesar 1,14%, dan di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -32,46% menjadi sebesar 0,77%. Dengan hasil dari rata-rata Rasio Efisiensi PAD sebesar 10,38%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PAD.

f. Rasio Keserasian Belanja.

i. Rasio Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun 2012-2016, maka perhitungan rasio belanja tidak langsung pemerintah daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 adalah sebagai berikut :

	$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
2012	$= \frac{276.157.535.899}{426.160.276.684} \times 100\%$ $= 64,80 \%$
2013	$= \frac{306.430.153.300}{545.553.069.011} \times 100\%$ $= 56,17 \%$
2014	$= \frac{342.054.327.008}{729.568.321.376} \times 100\%$ $= 46,88 \%$
2015	$= \frac{788.712.999.182}{367.337.150.089} \times 100\%$ $= 214,71 \%$
2016	$= \frac{447.584.048.569}{998.271.053.424} \times 100\%$ $= 44,84 \%$

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Belanja Tidak Langsung Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-11
Rasio Belanja Tidak Langsung APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung
2012	276.157.535.899	426.160.276.684	64,80 %
2013	306.430.153.300	545.553.069.011	56,17 %
2014	342.054.327.008	729.568.321.376	46,88 %
2015	788.712.999.182	367.337.150.089	214,71 %
2016	447.584.048.569	998.271.053.424	44,84 %
Rata-rata			85,48 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio belanja tidak langsung tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar -13,32% menjadi sebesar 56,17%, di tahun 2014 masih mengalami penurunan sebesar -16,54% menjadi sebesar 46,88%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 167,83% menjadi sebesar 214,71%, dan dari tahun 2015-2016 kembali mengalami penurunan sebesar -79,11% menjadi sebesar 44,84%. Dengan rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 85,48%.

ii. Rasio Belanja Langsung.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data total belanjalangsung terhadap total belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun 2012-2016, maka perhitungan rasio belanja langsung pemerintah daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 adalah sebagai berikut :

	Total Belanja Langsung	
Rasio Belanja Langsung	= $\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	x 100%
2012	= $\frac{150.002.740.785}{426.160.276.684}$	x 100%
	= 35,20 %	
2013	= $\frac{239.122.915.711}{545.553.069.011}$	x 100%
	= 43,83 %	
2014	= $\frac{387.513.994.368}{729.568.321.376}$	x 100%
	= 53,12 %	
2015	= $\frac{421.375.849.093}{367.337.150.089}$	x 100%
	= 114,71 %	
2016	= $\frac{550.687.004.855}{998.271.053.424}$	x 100%
	= 55,16 %	

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan Rasio Belanja Langsung Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-12
Rasio Belanja Langsung APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2012	150.002.740.785	426.160.276.684	35,20 %
2013	239.122.915.711	545.553.069.011	43,83 %
2014	387.513.994.368	729.568.321.376	53,12 %
2015	421.375.849.093	367.337.150.089	114,71 %
2016	550.687.004.855	998.271.053.424	55,16 %
Rata-rata			60,40 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio belanja langsung tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 24,52% menjadi sebesar 43,83%, di tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 21,19% menjadi sebesar 53,12%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 115,95% menjadi sebesar 114,71%, dan dari tahun 2015-2016 kembali mengalami penurunan sebesar -51,91% menjadi sebesar 55,16%. Dengan rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 60,40%.

5. Perhitungan Kinerja PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth*.

a. *Share*.

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data realisasi penerimaan PAD dalam laporan realisasi anggaran dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka perhitungan *share* pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota langsa adalah sebagai berikut :

Tabel IV-13
***Share* APBD Kota Langsa Tahun Anggaran**
2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Total Belanja Daerah	<i>Share</i>
2012	16.666.942.465	426.160.276.684	3,89 %
2013	57.243.381.959	545.553.069.011	10,48 %
2014	114.168.702.058	729.568.321.376	15,64 %
2015	109.116.860.676	788.712.999.182	13,83 %
2016	121.369.467.375	998.271.053.524	12,15 %
Rata-rata			11,20 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas terlihat perolehan PAD terhadap total belanja daerah (*share*) tahun 2012 adalah sebesar 3,89%, artinya total realisasi PAD Pemko Langsa hanya sebesar 0,389 kali dari total belanja daerah. Kemudian *share* tahun 2013 diperoleh angka sebesar 10,48%, artinya total realisasi PAD Pemko Langsa hanya sebesar 0,1048 kali dari total belanja daerah. Selanjutnya pada tahun 2014 perolehan *share* sebesar 15,64%, artinya total realisasi PAD Pemko Langsa hanya sebesar 0,1564 kali dari total belanja daerah. Kemudian *share* tahun 2015 diperoleh angka sebesar 13,83%, artinya total realisasi PAD Pemko Langsa hanya

sebesar 0,1383 kali dari total belanja daerah dan di tahun 2016 *share* yang diperoleh sebesar 12,15%, artinya total realisasi PAD Pemko Langsa hanya sebesar 0,1215 kali dari total belanja daerah. Dengan rata-rata *share* sebesar 11,20%.

b. Growth.

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data realisasi penerimaan PAD dalam laporan realisasi anggaran dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Langsa tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-14
Growth APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Growth
2012	16.666.942.465	-
2013	57.243.381.959	235,29 %
2014	114.168.702.058	100 %
2015	109.116.860.676	-4,39 %
2016	121.369.467.375	11,10 %
Rata-rata		85,56 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas terlihat perolehan pertumbuhan PAD (*growth*) tahun 2013 adalah sebesar 235,29%, artinya pertumbuhan PAD Pemko Langsa sebesar

0,23529 kali dari tahun sebelumnya. Kemudian pertumbuhan PAD pada tahun 2014 diperoleh angka sebesar 100%, artinya pertumbuhan PAD Pemko Langsa sebesar 0,100 kali dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2015 pertumbuhan PAD sebesar -4,39%, artinya pertumbuhan PAD Pemko Langsa sebesar 0,439 kali dari tahun sebelumnya dan tahun 2016 pertumbuhan PAD adalah sebesar 11,10%, artinya pertumbuhan PAD Pemko Langsa sebesar 0,1110 kali dari tahun sebelumnya. Dengan rata-rata *growth* sebesar 85,56%.

Dari hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Langsa tahun Anggaran 2012-2016, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel IV-15
***Share* dan *Growth* Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	<i>Share</i>	<i>Growth</i>
2012	3,89 %	-
2013	10,48 %	235,29 %
2014	15,64 %	100 %
2015	13,83 %	-4,39 %
2016	12,15 %	11,10 %
Rata-rata	11,20 %	85,56 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata *share* dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 11,20%, sedangkan rata-rata *growth* dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 85,56%. Ini menunjukkan pertumbuhan (*growth*) lebih besar dibandingkan dengan *share*. Kemudian diklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, maka kemampuan

keuangan daerah Kota Langsa berdasarkan kriteria pembentukan kuadran pada tabel 4.30 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-16
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan
Metode Kuadran

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka pembentukan dari kuadran dapat dilihat pada gambar berikut :

Rata-rata *Share* : 11,20%

Rata-rata *Growth* : 177,67%

Kuadran II Share : Rendah Growth : Tinggi	Kuadran II Share : Tinggi Growth : Tinggi
Kuadran IV Share : Rendah Growth : Rendah	Kuadran III Share : Tinggi Growth : Rendah

Gambar IV.1 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa (2012-2016)

Dari gambar diatas menunjukkan peta kemampuan keuangan daerah Kota Langsa dari hasil perhitungan *share* dan *growth* berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kota Langsa berada pada kuadran II, yaitu *share* rendah dan *growth* tinggi. Kodisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Langsa masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

H. Pembahasan.

- i. Analisis Kinerja Keuangan APBD Kota Langsa Menggunakan Rasio Keuangan.**
 - a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Rasio kemandirian digunakan untuk melihat sejauh mana dan seberapa besar pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan asli daerahnya. Dan juga untuk melihat apakah pemerintah daerah kota Langsa sudah mampu atau belum untuk membiayai pelaksanaan pemerintahnya dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri. Menurut Abdul Halim (2008:228) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan

retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Adapun kriteria penilaian kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

Tabel IV-17
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Berdasarkan penjelasan dari Kabag. Akuntansi dan Pelaporan Badan Sumber : Abdul Halim, 2008

Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, sumber pendapatan pemerintah kota Langsa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain dari PAD ada juga bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dan bantuan pusat seperti DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk melihat tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Langsa dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV-18
Persentase Rasio Kemandirian APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

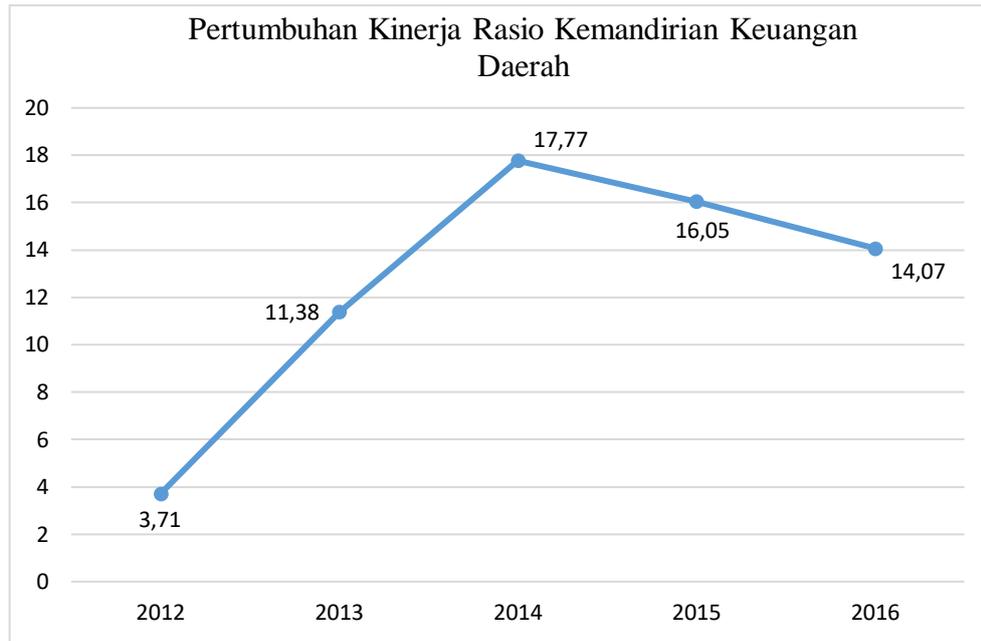
Tahun	Persentase Rasio Kemandirian	Kriteria Rasio Kemandirian	Kinerja
2012	3,71 %	0% - 25%	Instruktif
2013	11,38 %	0% - 25%	Instruktif
2014	17,77 %	0% - 25%	Instruktif
2015	16,05 %	0% - 25%	Instruktif
2016	14,07 %	0% - 25%	Instruktif
Rata-rata	12,59 %	0% - 25%	Instruktif

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa

Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012 diperoleh angka sebesar 3,71%. Kemudian tahun 2013 diperoleh angka rasio sebesar 11,38%. Kemudian tahun 2014 diperoleh angka rasio sebesar 17,77%. Selanjutnya tahun 2015 dan 2016 angka diperoleh yaitu sebesar 16,05% dan 14,07%. Selanjutnya dilihat dari rata-rata hasil perhitungan 5 tahun diperoleh angka rasio sebesar 12,59%. Berdasarkan rasio kemandirian disebutkan bahwa jika perolehan perhitungan perbandingan antara PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah kemudian dikali 100%, dan hasilnya berada diantara 0% - 25%, maka rasio kemandirian instansi tersebut dikatakan instruktif, yaitu tingkat kemampuan keuangan rendah sekali. Ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Langsa dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar IV.2. Pertumbuhan Kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan kinerja keuangan rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 berfluktuatif. Dimana dari tahun 2012-2013 rasio kemandirian mengalami peningkatan sebesar 205,09% dari tahun 2012 sehingga rasio kemandirian tahun 2013 adalah 11,83%. Selanjutnya pada tahun 2014 rasio kemandirian Pemko Langsa mengalami peningkatan sebesar 85,44% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio kemandirian Pemko Langsa ditahun 2014 sebesar 17,77%. Kemudian pada tahun 2015 rasio kemandirian pemerintah daerah kota Langsa mengalami penurunan sebesar -11,58% dari tahun sebelumnya, sehingga rasio kemandirian pemerintah daerah kota Langsa hanya sebesar 16,05%.

Selanjutnya pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar -14,41% dari tahun 2015, sehingga rasio kemandirian Pemko Langsa hanya sebesar 14,07%. Dari hasil perhitungan persentase rasio kemandirian APBD kota Langsa

tahun anggaran 2012-2016 pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil persentase rasio kemandirian yang terendah terjadi pada tahun 2012 dan tertinggi pada tahun 2014. Rendahnya rasio kemandirian disebabkan oleh jumlah PAD lebih rendah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Dalam pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan zakat, infak, dan sadaqah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi jenis PAD terhadap PAD pada APBD kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-19
Kontribusi Jenis PAD Terhadap PAD pada APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis PAD	2012		2013		2014		2015		2016	
		Penerimaan	Kontribusi	Penerimaan	Kontribusi	Penerimaan	Kontribusi	Penerimaan	Kontribusi	Penerimaan	Kontribusi
1	Pajak Daerah	6.017.355.773	36,10 %	6.109.180.218	10,67 %	9.400.051.991	8,23 %	10.090.865.225	9,25 %	10.855.975.158	8,94 %
2	Hasil Kontribusi Daerah	10.627.280.066	63,76 %	5.206.868.353	9,09 %	12.800.842.081	11,21 %	4.349.945.627	3,99 %	4.563.580.383	3,76 %
3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	267.347.897	1,60 %	363.617.460	0,63 %	397.301.824	0,35 %	518.845.242	0,47 %	515.564.364	0,42 %
4	Penerimaan Zakat, Infak, dan Sadaqah	-	-	-	-	2.082.469.922	1,82 %	2.474.092.143	2,27 %	2.304.927.949	1,89 %
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	673.825.899	4,04 %	45.563.715.928	79,59 %	89.488.036.240	78,38 %	91.683.112.439	84,02 %	103.129.419.521	84,97 %
	Jumlah PAD	16.666.942.465		57.243.381.939		114.168.702.038		109.116.860.676		121.369.467.375	

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel perhitungan jenis PAD terhadap PAD diatas, maka dapat kita simpulkan rata-rata dari kontribusi jenis PAD terhadap PAD adalah sebagai berikut :

Tabel IV-20
Kontribusi Jenis PAD Terhadap PAD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis PAD	Kontribusi Jenis PAD terhadap PAD					
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pajak Daerah	36,10 %	10,67 %	8,23 %	9,25 %	8,94 %	14,63 %
2	Hasil Retribusi Daerah	63,76 %	9,09 %	11,21 %	3,99 %	3,76 %	18,36 %
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	1,60 %	0,63 %	0,35 %	0,47 %	0,42 %	0,69 %
4	Penerimaan Zakat, Infak, dan Sadaqah	-	-	1,82 %	2,27 %	1,89 %	1,99 %
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,04 %	79,59 %	78,38 %	84,02 %	84,97 %	66,20 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil rata-rata daripajak daerah adalah sebesar 14,63%, kemudian hasil retribusi daerah sebesar 18,36%, selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah sebesar 0,69%, kemudian penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah sebesar 1,99%, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 66,20%. Dengan meningkatkan PAD dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Disahkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, telah membawa peluang yang cukup besar bagi daerah termasuk kota Langsa

untuk meningkatkan PAD. Kota Langsa memiliki potensi sumber daya ekonomi lokal yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah. Pajak daerah di Kota Langsa rendah yang harusnya pajak daerah itu tinggi, kontribusi pajak daerah hanya sebesar 14,63% kalah dari hasil retribusi yang kontribusi pajaknya sebesar 18,36%. Oleh karena itu, pendapatan pajak daerah harus di tingkatkan dalam PAD, karena pajak daerah merupakan komponen penting untuk menaikkan pendapatan asli daerah, jadi jika pendapatan daerah ditingkatkan maka pendapatan asli daerah juga bertambah dan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa pun semakin membaik dalam mengelola PADnya. Berikut ini adalah kontribusi jenis pajak daerah terhadap jumlah pendapatan pajak daerah kota langsa :

Tabel IV-21
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Jumlah Pendapatan
Pajak Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Jumlah
1	Pajak Hotel	199.986.530	3,32 %
2	Pajak Restoran	73.855.000	1,44 %
3	Pajak Hiburan	8.457.000	0,14 %
4	Pajak Reklame	138.328.000	2,29 %
5	Pajak Penerangan Jalan	3.693.908.891	61,38 %
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian	39.690.012	0,65 %
7	Pajak Parkir	2.746.000	0,04 %
8	Pajak Sarang Burung Walet	22.650.000	0,37 %
9	Pajak Daerah lainnya	918.867.170	15,27 %
10	Pajak Bumi dan Bangunan	115.047.750	1,91 %
11	BPHTB	803.819.420	13,35 %
Pendapatan Pajak Daerah		6.017.355.773	100 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapajenis pajak yang dapat dipungut daerah kota Langsa menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang

No. 28 Tahun 2009. Hal ini secara tegas tersirat dalam pasal 2 ayat 3, yaitu daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2. Dengan kata lain, tidak ada peluang bagi pemerintah kota Langsa menetapkan jenis pajak baru. Pemerintah Kota Langsa selayaknya mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak daerah yang sudah ada, mengembangkan, dan pendayagunaan potensi jenis pajak daerah, seperti Pajak Sarang Burung Walet. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel kontribusi jenis pajak daerah terhadap jumlah pendapatan daerah, pada jenis pajak daerah yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,37% masih bisa ditingkatkan, karena sarang burung walet memiliki potensi yang memadai untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dari hasil observasi pada daerah kota Langsa hampir rata-rata bagian atas pertokoan dijadikan tempat pembudidayaan sarang burung walet. Contohnya seperti pada Jl. Iskandar Muda rata-rata bagian atas toko mereka jadikan tempat pembudidayaan sarang burung walet. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD Pemko Langsa yang menyatakan bahwa pada objek pajak sarang burung walet mempunyai peluang besar dalam meningkatkan PAD Kota Langsa, karena mayoritas masyarakat di Kota Langsa membudidayakan sarang burung walet, terutama di pertokoan. Namun banyak usaha sarang burung walet tersebut yang illegal, sehingga pemasukan daerah dari sektor pajak sarang burung walet minim. Sedikitnya 14 dari 40 lebih lokasi panangkaran sarang walet milik para pengusaha di Kota Langsa hingga saat ini belum memiliki izin dari kantor pelayanan dan perizinan terpadu Kota Langsa. Sesuai Qanun No. 5 tahun 2008 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang

burung walet, dimana pemasukan dari sarang burung walet itu sangat besar yakni mencapai 20% dari setiap hasil panen. Pemerintah Kota Langsa akan mendayagunakan peluang tersebut untuk menata kembali objek-objek pajak daerah sehingga diharapkan berkontribusi signifikan terhadap PAD kota Langsa.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kota Langsa untuk meningkatkan PADnya adalah dengan perbaikan kelembagaan, mekanisme kerja, koordinasi, dan sosialisasi atau penyuluhan informasi yang berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat didalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi. Masyarakat memberikan pengharapan yang cukup besar terhadap peran dan fungsi pemerintah daerah kota Langsa untuk menciptakan dan memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakinbaik pula. Sehingga hal ini akan memberikan gambaran pertanggungjawaban yang baik kepada pemerintah pusat, bahwa kinerja keuangan pemerintah setempat dalam hal kemandirian keuangan daerah akan terus mencapai *trend* yang positif pada tahun-tahun berikutnya.

b. Rasio Ketergantungan Daerah.

Rasio ketergantungan daerah digunakan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga

ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.

Untuk melihat tingkat ketergantungan daerah Pemko Langsa dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV-22
Persentase Rasio Ketergantungan Daerah APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

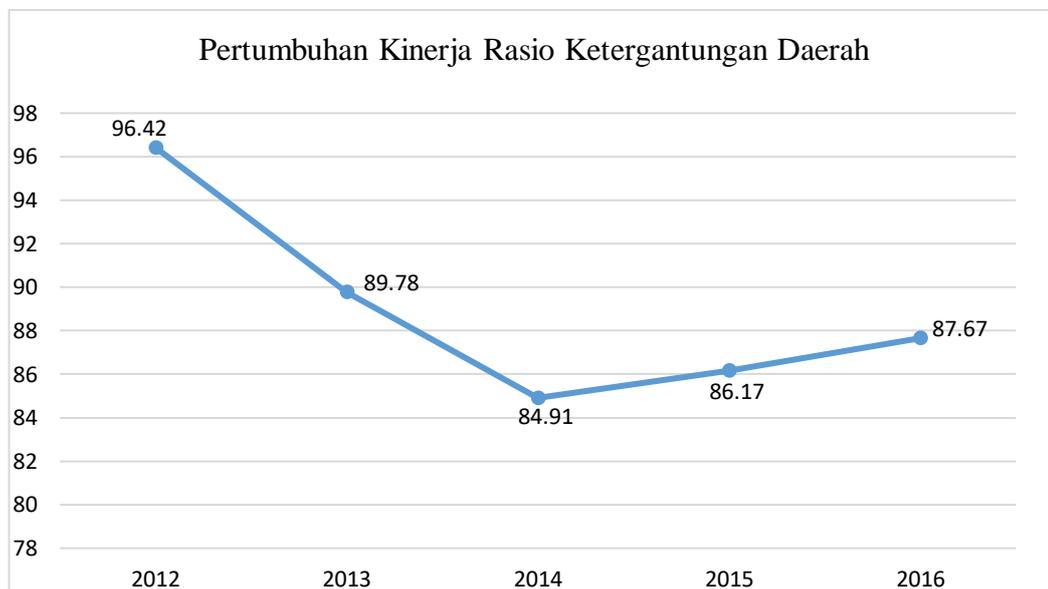
Tahun	Persentase Rasio Ketergantungan Daerah	Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah	Kinerja
2012	96,42 %	>50,00	Sangat Tinggi
2013	89,78 %	>50,00	Sangat Tinggi
2014	84,91 %	>50,00	Sangat Tinggi
2015	86,17 %	>50,00	Sangat Tinggi
2016	87,67 %	>50,00	Sangat Tinggi
Rata-rata	88,99 %	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentasi rasio ketergantungan daerah yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012 angka yang diperoleh sebesar 96,42%. Kemudian pada tahun 2013 diperoleh angka 89,78%. Selanjutnya tahun 2014 diperoleh angka 84,91% . kemudian pada tahun 2015 dan 2016 angka yang diperoleh yaitu sebesar 86,17% dan 87,67%. Selanjutnya dilihat dari rata-rata hasil perhitungan dalam 5 tahun diperoleh angka rasio ketergantungan daerah sebesar 88,99%. Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah kemudian dikali 100%, dan hasilnya berada pada angka >50,00 maka rasio ketergantungan daerah instansi

tersebut dikatakan sangatteringgi. Ini disebabkan oleh jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan dengan total penerimaan daerah menunjukkan peningkatan persentase sedikit berfluktuatif, sehingga belum mampu meningkatkan PAD dan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja rasio ketergantungan daerah pemerintah kota Langsa dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar IV.3. Pertumbuhan Kinerja Rasio Ketergantungan Daerah APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat tingkat ketergantungan daerah Pemko Langsa tahun anggaran 2012-2016 belum stabil. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 96,42%, sedangkan tingkat ketergantungan yang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 84,91%. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pemerintah kota Langsa terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemko Langsa terhadap pemerintah pusat dalam

kurun waktu 5 tahun (2012-2016) angka rasio sebesar sebesar 88,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah.

Dari hasil perhitungan persentase rasio ketergantungan daerah APBD kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 pada tabel IV-20 dapat dilihat bahwa hasil persentase rasio ketergantungan daerah yang terendah terjadi pada tahun 2014 dan tertinggi pada tahun 2012. Meningkatnya rasio ketergantungan daerah disebabkan oleh total pendapatan daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Dalam pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi jenis pendapatan terhadap total pendapatan pada APBD kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-23
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Pada APBD
Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Pendapatan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Penerimaan	Kontribusi								
1	Pendapatan Asli Daerah	16.666.942.465	3,57 %	57.243.381.959	10,22 %	114.168.702.058	15,09 %	109.116.860.676	13,83 %	121.369.467.335	12,33 %
2	Dana Perimbangan	395.534.269.334	85,09 %	445.928.780.151	79,50 %	479.418.226.550	63,37 %	505.098.308.709	64,02 %	656.804.723.246	66,74 %
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	53.810.641.527	11,54 %	56.849.079.804	10,15 %	162.906.191.305	21,53 %	174.676.354.747	22,14 %	205.885.860.856	20,92 %
	Total Pendapatan	466.011.853.327	100 %	560.021.241.915	100 %	756.493.119.913	100 %	788.891.524.132	100 %	984.060.051.478	100 %

Sumber: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel perhitungan jenis pendapatan terhadap total pendapatan diatas, maka dapat kita simpulkan rata-rata dari kontribusi jenis pendapatan terhadap total pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV-24
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan
Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Pendapatan	Kontribusi Jenis Pendapatan terhadap Total Pendapatan					
		2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pendapatan Asli Daerah	3,57 %	10,22 %	15,09 %	13,83 %	12,33 %	11,00 %
2	Dana Perimbangan	85,09 %	79,50 %	63,37 %	64,02 %	66,74 %	71,74 %
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	11,54 %	10,15 %	21,53 %	22,14 %	20,92 %	17,25 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari hasil rata-rata kontribusi jenis pendapatan terhadap total pendapatan yang terendah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 11,00%, maka dari itu yang harus di tingkatkan dalam total pendapatan adalah pendapatan asli daerah. Sebagaimana tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun diakui pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana perimbangan sebagai wujud hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, namun PAD tetap merupakan unsur terpenting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. PAD merupakan akumulasi dana yang berhasil dihimpun daerah sesuai dengan

kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, besar kecilnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Besarnya kontribusi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah mengakibatkan ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat semakin besar.

Rendahnya total pendapatan daerah kota Langsa dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah rendah. Penyebab rendahnya hasil dari total pendapatan daerah kota Langsa dikarenakan oleh pendapatan pajak daerah yang rendah, yang dapat dilihat pada tabel IV-19. Tidak hanya itu di dalam jenis PAD yang dapat ditingkatkan adalah Hasil Retribusi Daerah. Dimana retribusi daerah adalah bagian dari pada pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah kota Langsa. Untuk mengetahui kontribusi jenis retribusi daerah terhadap hasil retribusi kota Langsa dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV-25
Kontribusi Jenis Retribusi Daerah Terhadap Hasil Retribusi Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi	Jumlah
1	Retribusi Jasa Umum	8.972.485.066	84,43 %
2	Retribusi Jasa Usaha	496.292.000	4,67 %
3	Retribusi Perizinan Tertentu	407.442.000	3,83 %
4	Retribusi Lainnya	751.061.000	7,07 %

Hasil Retribusi Daerah	10.627.280.066	100 %
-------------------------------	----------------	-------

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi jenis retribusi daerah yang dapat ditingkatkan adalah Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar 84,43%, karena memiliki potensi atau peranan yang besar untuk menaikkan hasil retribusi daerah. Misalnya pemungutan retribusi parkir pada tempat umum, seperti pada Rumah Sakit yang memungut parkir setiap hari. Qanunkota Langsa No. 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum salah satunya mengatur adanya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut retribusinya sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun pembentukan Qanun Retribusi Jasa Umum itu diatur dalam pasal 108 dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimana objek dari retribusi daerah itu sendiri adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD Pemko Langsa yang menyatakan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum sangatlah penting bagi pendapatan asli daerah kota langsa yang dimana hasil dari pada pemungutan parkir ditepi jalan umum lebih besar dibandingkan dengan pemasukkan dari pada pajak parkir itu sendiri, dimana pajak parkir perbandingannya hanya 80:20. 80% itu dinikmati oleh pengelola parkir, sedangkan 20% itu masuk kedalam kas daerah. Hasil dari pada pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang telah ditetapkan oleh walikota juga sangatlah berpengaruh bagi pendapatan

asli daerah yang dimana hasil pemungutan tersebut masuk kedalam kas daerah. Perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir sangatlah beda dan daerah lebih diuntungkan dengan pemungutan retribusi parkir dari pada pajak parkir. Dimana pajak merupakan iuran yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung, sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

c. Rasio Derajat Desentralisasi.

Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk melihat derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Untuk mengetahui perkembangan derajat desentralisasi PAD pemerintah daerah kota Langsa terhadap total penerimaan daerah dari tahun 2012-2016, maka dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

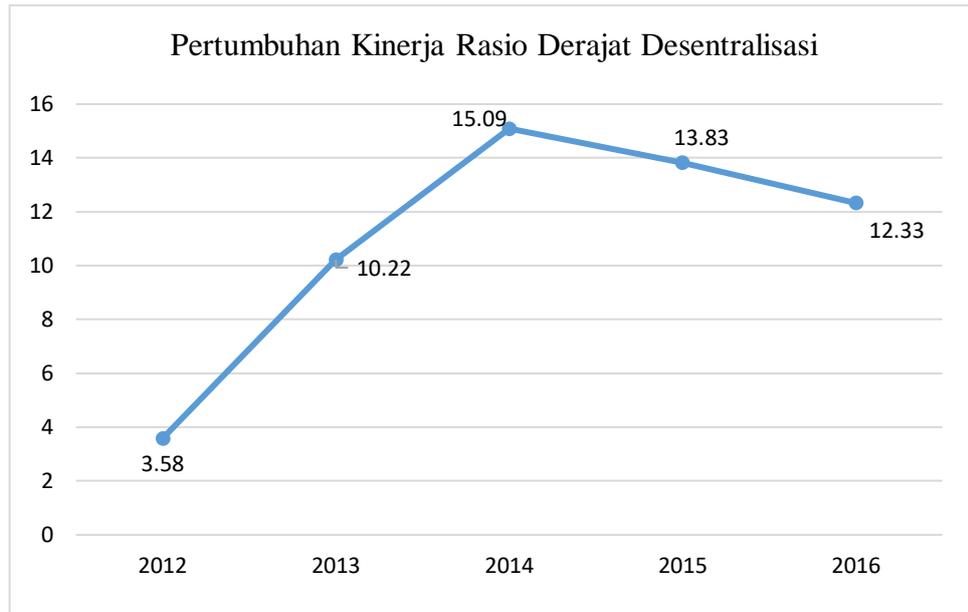
Tabel IV-26
Persentase Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Persentase Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Rasio Derajat Desantralisasi	Kinerja
2012	3,58 %	0,00 -10,00	Sangat Kurang
2013	10,22 %	10,01 -20,00	Kurang
2014	15,09 %	10,01 -20,00	Kurang
2015	13,83 %	10,01 -20,00	Kurang
2016	12,33 %	10,01 -20,00	Kurang
Rata-rata	11,01 %	10,01 -20,00	Kurang

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio derajat desentralisasi yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012 angka yang diperoleh sebesar 3,58%. Kemudian pada tahun 2013 diperoleh angka 10,22%. Selanjutnya tahun 2014 diperoleh angka 15,09%. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 angka yang diperoleh yaitu sebesar 13,83% dan 12,33%. Selanjutnya dilihat dari rata-rata hasil perhitungan dalam 5 tahun diperoleh angka rasio sebesar sebesar 11,01%. Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dibagi dengan total PAD kemudian dikali 100%, dan hasilnya berada pada angka 10,01-20,00 yaitu sebesar 11,01% maka perusahaan atau instansi tersebut dikatakan kurang. Artinya bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah kota Langsa kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi atau melaksanakan pembangunannya.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pertumbuhan kinerja keuangan rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kota Langsa selama 5 tahun (2012-2016), dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Gambar IV.4. Pertumbuhan Kinerja Rasio Derajat Desentralisasi APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio derajat desentralisasi yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012-2013 rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 naik sebesar 185,47%, di tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 47,65%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar -8,35%, dan dari tahun 2015-2016 masih mengalami penurunan sebesar -10,85%.

Rasio derajat desentralisasi Pemko Langsa memiliki hasil rata-rata sebesar 11,01% yang berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan PAD dari anggaran pendapatan yang besumber dari pendapatan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel IV-19. Dimana pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kabag. Akuntansi

dan Pelaporan BPKD Pemko Langsa yang menyatakan bahwa keadaan ini diperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

d. Rasio Efektivitas PAD.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk melihat apakah pemerintah daerah kota Langsa sudah efektif di dalam memperoleh pendapatannya, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV-27
Persentase Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

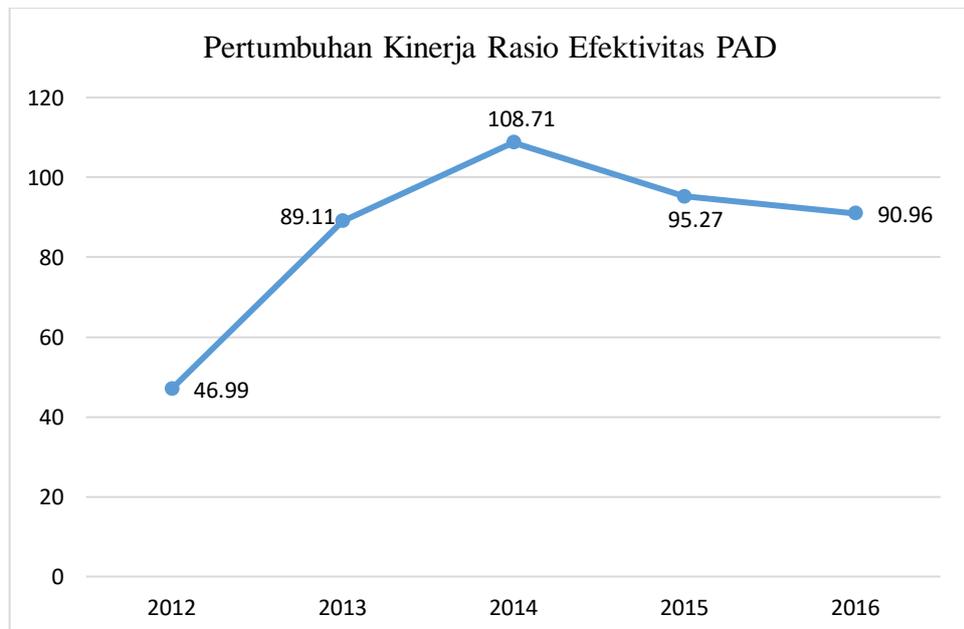
Tahun	Persentase Rasio Efektivitas PAD	Kriteria Rasio Efektivitas	Kinerja
2012	46,99 %	<60 %	Tidak Efektif
2013	89,11 %	80-90 %	Cukup Efektif
2014	108,71 %	>100 %	Sangat Efektif
2015	95,27 %	90-100 %	Efektif
2016	90,96 %	90-100 %	Efektif
Rata-rata	86,21 %	80-90 %	Cukup Efektif

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio efektivitas PAD yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012 angka

yang diperoleh sebesar 46,99%. Kemudian pada tahun 2013 diperoleh angka 89,11%. Selanjutnya tahun 2014 diperoleh angka 108,71%. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 angka yang diperoleh yaitu sebesar 95,27% dan 90,96%. Dengan hasil rata-rata angka rasio efektivitas PAD selama 5 tahun yaitu sebesar 86,21%. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi PAD dibagi dengan target penerimaan PAD kemudian dikali 100. Dari tabel diatas dilihat dari nilai rata-rata tingkat pertumbuhan kinerja keuangan rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil sebesar 80-90%. Artinya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa berdasarkan rasio efektivitas PAD cukup efektif. Ini menunjukkan kemampuan daerah semakin baik.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pertumbuhan kinerja rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kota Langsa selama 5 tahun (2012-2016), dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Gambar IV.6. Pertumbuhan Kinerja Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Dari gambar diatas maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan kinerja keuangan rasio efektivitas PAD Pemko Langsa tahun anggaran 2012-2016 berfluktuatif. Dapat di lihat bahwa untuk rasio efektivitas PAD tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 89,63%, di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 21,99%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar-12,36%, dan dari tahun 2015-2016 masih mengalami penurunan sebesar-4,52%. Dengan hasil rata-rata sebesar 86,12%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa berdasarkan rasio efektivitas PAD cukup efektif dalam mengelola PADnya yang berarti kemampuan daerah semakin baik.

e. Rasio Efisiensi PAD.

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi PAD berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa berdasarkan hasil dari perhitungan rasio efisiensi PAD Kota Langsa tahun anggaran 2012-2016, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV-28
Persentase Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

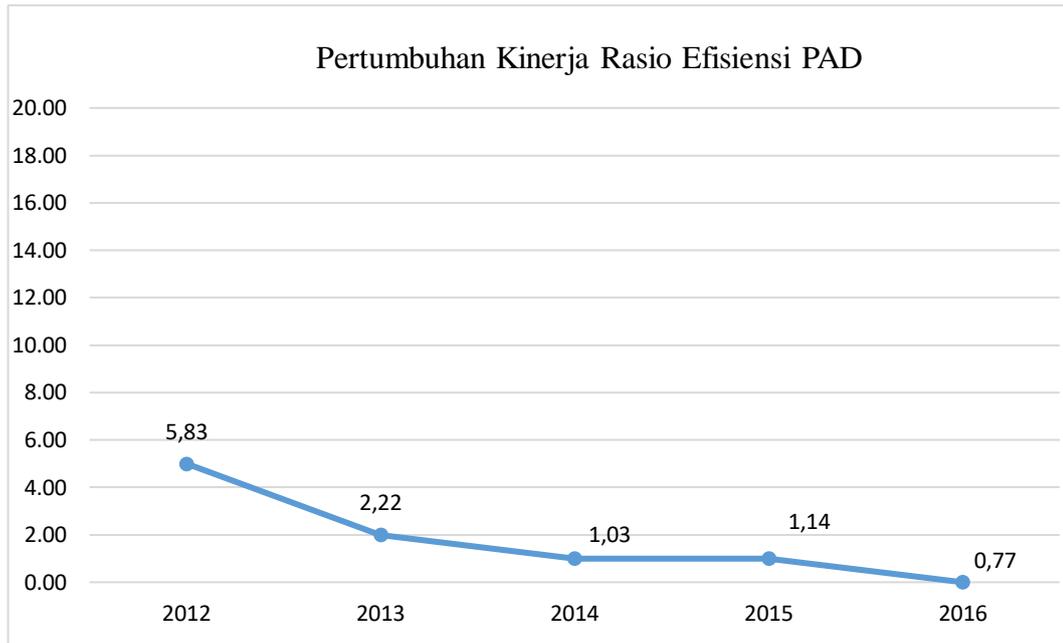
Tahun	Persentase Rasio Efisiensi	Kriteria Rasio Efisiensi	Kinerja
-------	----------------------------	--------------------------	---------

2012	5,83 %	< 10%	Sangat Efisien
2013	2,22 %	< 10%	Sangat Efisien
2014	1,03 %	< 10%	Sangat Efisien
2015	1,14 %	< 10%	Sangat Efisien
2016	0,77 %	< 10%	Sangat Efisien
Rata-rata	10,38 %	> 10%	Efisien

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio efisiensi yang diperoleh dari perhitungan pertahun berfluktuatif, yaitu pada tahun 2012 angka rasio efisiensi PAD yang diperoleh sebesar 5,83%. Kemudian pada tahun 2013 sebesar 2,22%. Selanjutnya pada tahun 2014 diperoleh hasil sebesar 1,03%. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 hasil yang diperoleh sebesar 1,14% dan 0,77%. Dengan hasil rata-rata angka rasio efektivitas PAD selama 5 tahun yaitu sebesar 10,38%.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pertumbuhan kinerja keuangan rasio efisiensi PAD pemerintah daerah kota Langsa selama 5 tahun, dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar IV.6. Pertumbuhan Kinerja Rasio Efisiensi PAD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Dari grafik diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio efisiensi PAD tahun 2012-2016 berfluktuatif. Dimana tingkat pertumbuhan rasio efisiensi PAD dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar -61,92% menjadi sebesar 2,22%, di tahun 2014 masih mengalami penurunan sebesar -53,60% menjadi sebesar 1,03%, di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 10,68% menjadi sebesar 1,14%, dan di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -32,46% menjadi sebesar 0,77%. Dengan hasil dari rata-rata Rasio Efisiensi PAD sebesar 10,38%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PAD.

Menurut kriteria rasio efisiensi PAD, tingkat efisiensi perusahaan atau instansi pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang didapat berada diantara <10%. Kemudian jika hasil perolehan berada diantara >40% maka

perusahaan atau instansi tersebut dikatakan tidak efisien. Dari tabel IV-28 menunjukkan bahwa hasil dari rata-rata tingkat pertumbuhan kinerja keuangan rasio efisiensi PAD angkanya berada >10% yaitu sebesar 10,38%, ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Langsa selama tahun anggaran 2012-2016 sudah efisien didalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PAD. Dimana biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih kecil dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD.

f. Rasio Kecerahan Belanja.

Rasio kecerahan belanja terdiri dari rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung. Analisis proporsi belanja tidak langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary control*). Belanja tidak langsung dan belanja langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal. Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung merupakan klarifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan pengklasifikasian belanja operasi dan belanja modal adalah klarifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio

Keserasian Belanja APBD selama tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-29
Persentase Rasio Keserasian Belanja APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

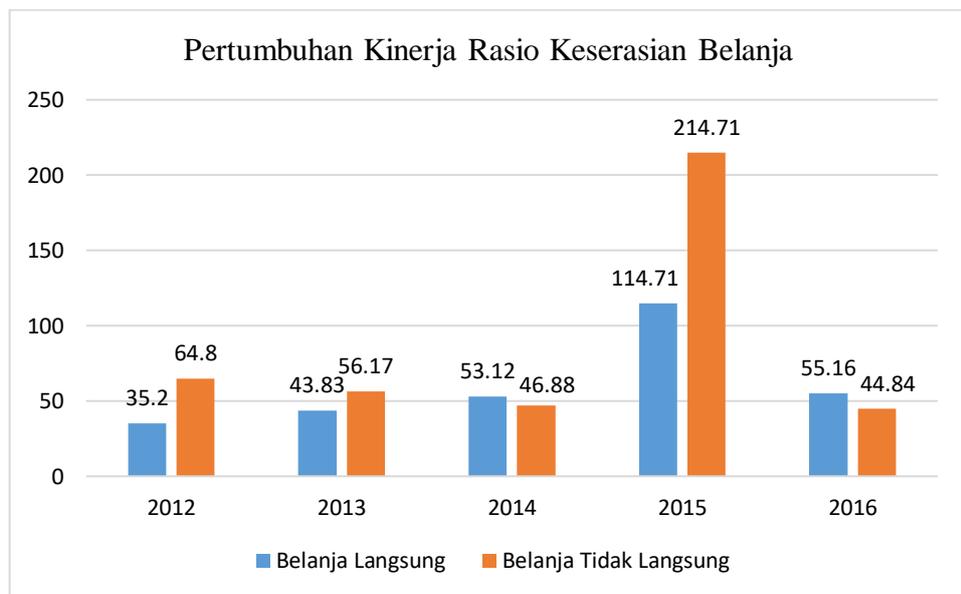
Tahun	Rasio Belanja Langsung	Rasio Belanja Tidak Langsung
2012	35,20 %	64,80 %
2013	43,83 %	56,17 %
2014	53,12 %	46,88 %
2015	114,71 %	214,71 %
2016	55,16 %	44,84 %
Rata-rata	60,40 %	85,48%

Sumber :Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung yang diperoleh berfluktuatif. Pada tahun 2012 angka yang diperoleh dari rasio belanja langsung sebesar 35,20%, sementara rasio belanja tidak langsung sebesar 64,80%. Kemudian pada tahun 2013 rasio belanja langsung sebesar 43,83%, dan rasio belanja tidak langsung sebesar 56,17%. Selanjutnya pada tahun 2014 rasio belanja langsung sebesar 53,12%, sementara rasio belanja tidak langsung sebesar 46,88%. Kemudian pada tahun 2015 rasio belanja langsung sebesar 114,71%, dan rasio belanja tidak langsung sebesar 214,71%, dan tahun 2016 rasio belanja langsung yang diperoleh sebesar 55,16%, dan rasio belanja tidak langsung sebesar 44,84%.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Langsa selama 5 tahun (2012-2016) perolehan rata-rata angka rasio belanja langsung

sebesar 60,40%, sedangkan rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 85,48%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rasio belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung. Untuk lebih jelasnya bagaimana pertumbuhan kinerja rasio keserasian belanja Pemko Langsa selama 5 tahun (2012-2016), dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Gambar IV.7. Pertumbuhan Kinerja Rasio keserasian Belanja APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

Dari gambar diatas dapat di lihat bahwa untuk rasio belanja langsung tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 24,52%, di tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 21,19%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 115,95%, dan dari tahun 2015-2016 kembali mengalami penurunan sebesar - 51,91%. Dengan hasil rata-rata dari tingkat pertumbuhan kinerja keuangan Rasio Belanja Tidak Langsung sebesar 27,44%. Sedangkan untuk rasio belanja tidak langsung tingkat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar -13,32%, di tahun 2014 masih mengalami penurunan sebesar -

16,54%, kemudian dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 167,83% , dan dari tahun 2015-2016 kembali mengalami penurunan sebesar -79,11%. Ini menunjukkan bahwa fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi pada pemerintah daerah kota Langsa belum berjalan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung. Belanja langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Rasio Keserasian Belanja disebutkan bahwa semestinya belanja langsung harus lebih besar dari pada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

ii. Analisis penyebab pendapatan daerah beberapa tahun belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pada pemerintah daerah kota Langsa dalam beberapa tahun pendapatannya belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD Kota Langsa. Berikut ini adalah ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 :

Tabel IV-30
Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	PENDAPATAN		
	Anggaran	Realisasi	Jumlah
2012	470.985.346.660	466.011.853.327	98,94 %
2013	568.604.409.638	560.021.241.915	98,94 %
2014	751.849.914.120	756.493.119.913	100,62 %
2015	818.157.958.122	788.891.524.132	96,42 %
2016	1.064.839.552.341	984.060.051.478	92,41 %
Rata-rata			97,47 %

Dari ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pada beberapa tahun masih belum mencapai target pendapatan yang dianggarkan, yaitu pada tahun 2012 diperoleh angka sebesar 98,94%, di tahun 2013 masih memperoleh angka 98,94%. Kemudian pada tahun 2014 diperoleh angka 100,62%. Selanjutnya di tahun 2015 diperoleh angka sebesar 96,42% dan di tahun 2016 diperoleh angka sebesar 92,41%. Dengan rata-rata pendapatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar 97,47%. Rendahnya Pendapatan daerah dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) lebih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dimana sebelumnya dapat dilihat pada tabel IV-23. Berikut ini adalah kontribusi dari jenis pendapatan APBD Kota Langsa sebagai berikut :

Tabel IV-31
Kontribusi dari Jenis Pendapatan APBD Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pendapatan	3,57 %	10,22 %	15,09 %	13,83 %	12,33 %	11,00 %

	Asli daerah						
2	Dana Perimbangan	85,09 %	79,50 %	63,37 %	64,02 %	66,74 %	71,74 %
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,54 %	10,15 %	21,53 %	22,14 %	20,92 %	17,26 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi dari jenis pendapatan yang terendah adalah pendapatan asli daerah, yaitu hanya sebesar 11,00% dibandingkan dengan dana perimbangan sebesar 71,74 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,26 %,maka dari itu yang harus di tingkatkan dalam total pendapatan adalah pendapatan asli daerah. Sebagaimana tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun diakui pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana perimbangan sebagai wujud hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, namun PAD tetap merupakan unsur terpenting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. PAD merupakan akumulasi dana yang berhasil dihimpun daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat. Atau dengan kata lain, besar kecilnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Walaupun realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target penerimaan PAD yang dianggarkan, namun tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kota Langsa sudah cukup efektif, karena setiap tahunnya penerimaan PAD Kota Langsa terus meningkat yang dapat dilihat pada tabel IV-9. Dimana hasil rata-rata rasio efektivitas sebesar 86,21% yang diperoleh

dari perhitungan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD kemudian dikali 100% dan diperoleh hasil kriteria pengukuran efektivitas yang cukup efektif.

Besarnya kontribusi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah mengakibatkan ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat semakin besar. Rendahnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menyebabkan pada beberapa tahun pendapatan daerah kota Langsa belum mencapai target yang dianggarkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD kota Langsa, bahwa PAD masih belum mendominasi pendapatan pemerintah daerah kota Langsa. Dikarenakan jumlah transfer pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman begitu besar. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi. Sebagai contoh misalnya target pajak hotel sebesar Rp. 600jt, tetapi karena orang yang menginap pada hotel berkurang sehingga pajak hotel tersebut setorannya berkurang, kemudian seperti retribusi parkir yang diharapkan bisa masuk sebesar Rp.60jt ternyata dilapangan tidak tercapai yang disebabkan oleh setoran dari pengutip parkir ke Pemko tidak sesuai yang diharapkan. Dalam konteks otonomi daerah, kondisi tersebut dipandang bahwa Kota Langsa belum sepenuhnya mampu menggali berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah. Oleh karena itu, kondisi aktual tersebut harus dicermati dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah Kota Langsa.

Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD kota Langsa juga mengatakan bahwa hambatan dan kendala yang ada di dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan adalah masalah perangkat hukum khususnya peraturan daerah maupun peraturan lainnya yang seharusnya mampu mengatur dalam pengelolaan keuangan daerah baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yang terbatas pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Selain itu Pemerintah Kota Langsa belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan ketentuan perundangan dari Permendagri No. 29 tahun 2002 ke Kepmendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 64 tahun 2013.

iii. Analisis penyebab meningkatnya belanja daerah pada tahun anggaran 2012-2016 pada pemerintahan daerah Kota Langsa.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pemerintah kota Langsa belanja daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berikut ini adalah ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 :

Tabel IV-32
Realisasi Anggaran Belanja Kota Langsa
Tahun Anggaran 2012-2016
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	BELANJA	
	Realisasi	Pertumbuhan
2012	426.160.276.684	-
2013	545.553.087.985	28,17 %
2014	729.568.321.376	33,70 %
2015	788.712.999.182	8,08 %
2016	998.271.053.424	26,49 %
Rata-rata		24,11 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari ringkasan realisasi belanja daerah kota Langsa dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dimana tingkat pertumbuhan belanja Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar 24,11%. Di dalam jenis belanja terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung yang sebelumnya telah dihitung kontribusi belanja, dimana memperoleh hasil untuk rata-rata biaya tidak langsung sebesar 52,56% dan belanja langsung sebesar 48,14%. Pada belanja tidak langsung belanja tertinggi bersumber dari belanja pegawai yaitu sebesar 93,54%, sedangkan pada belanja langsung bersumber dari belanja modal yaitu sebesar 38,54%. Kontribusi jenis belanja daerah terhadap belanja daerah pada APBD kota Langsa tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-33
Kontribusi Jenis Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada APBD
Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Belanja Daerah	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata
		Penerimaan	Kontribusi									
1	Belanja Tidak Langsung	276.157.555.099	64,80 %	306.430.153.300	56,17 %	342.054.327.008	46,88 %	367.337.150.089	46,57 %	447.594.048.569	44,84 %	52,56 %
2	Belanja Langsung	150.002.740.785	35,20 %	239.122.915.711	43,83 %	387.513.994.368	53,12 %	421.375.849.093	53,43 %	530.687.004.855	55,16 %	48,44 %
	Belanja Daerah	426.160.276.684	100 %	545.553.069.011	100 %	729.568.321.376	100 %	788.712.999.182	100 %	998.271.053.424	100 %	100 %

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari hasil rata-rata kontribusi jenis belanja daerah terhadap belanja daerah yang tertinggi adalah Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 52,56%, dibandingkan Belanja Langsung hanya sebesar 48,14%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata belanja langsung lebih kecil dari belanja tidak langsung. Belanja langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah belanja daerah, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan karena pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan kinerja daerah yang dikeluarkan pemerintah.

Untuk mengetahui apa yang memicu besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah kota Langsa pada belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV-34
Kontribusi Jenis Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Tidak Langsung Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Belanja Tidak Langsung	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata	
		Jumlah	%	Jumlah	%								
1	Belanja Pegawai	261.349.233.750	94,64%	286.276.108.300	93,42%	319.965.073.744	93,54%	333.879.732.430	90,89%	355.119.475.382	79,34%		90,37%
2	Belanja Hibah	9.747.967.397	3,53%	1.016.767.000	0,33%	3.825.892.264	1,12%	1.825.000.000	0,50%	20.495.734.000	4,58%		2,01%
3	Belanja Bantuan Sosial	3.179.331.000	1,15%	7.929.064.000	2,59%	6.740.133.000	1,97%	2.645.229.000	0,72%	2.404.007.000	0,54%		1,39%
4	Belanja Bantuan Keuangan	1.261.993.000	0,46%	11.118.444.000	3,63%	11.062.828.000	3,23%	28.714.674.659	7,81%	69.461.069.687	15,52%		6,13%
5	Belanja Tidak Terduga	240.385.000	0,09%	89.770.000	0,03%	460.400.000	0,13%	272.414.000	0,07%	103.762.500	0,02%		0,07%
	Belanja Tidak Langsung	276.157.535.899	100%	306.430.153.300	100%	342.054.327.008	100%	367.337.150.089	100%	447.584.048.569	100%		100%

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memicu besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah kota Langsa untuk belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai yang memiliki rata-rata sebesar 90,37% selama 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum mampu dalam meminimalkan kinerja daerah yang dikeluarkan pemerintah yang dapat kita lihat pada tabel IV-33, dimana proporsi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja langsung.

Berikut ini kontribusi jenis belanja pegawai terhadap belanja pegawai Kota Langsa :

Tabel IV-35

Kontribusi Jenis Belanja Pegawai Terhadap Belanja Pegawai Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Belanja Pegawai	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata
		Jumlah	%									
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	211.141.312.867	80,79%	225.686.452.973	78,84%	239.783.901.131	74,92%	258.149.341.332	77,48%	272.351.805.147	76,62%	77,73%
2	Tambahan Penambahan PNS	48.857.207.188	18,69%	59.048.763.566	20,63%	77.936.777.733	24,14%	73.456.451.098	21,92%	80.731.723.870	22,54%	21,58%
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	865.000.000	0,33%	905.000.000	0,32%	1.655.000.000	0,52%	1.650.000.000	0,49%	1.570.000.000	0,44%	0,23%
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	485.713.695	0,19%	333.718.881	0,12%	589.394.880	0,18%	623.940.000	0,19%	465.946.365	0,13%	0,16%
	Belanja Pegawai	261.349.233.750	100%	286.276.108.300	100%	319.965.073.744	100%	333.879.732.430	100%	355.119.475.382	100%	100%

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai bersumber dari belanja gaji dan tunjangan, dimana diperoleh rata-rata angka sebesar 77,73%. Oleh karena itu pemerintah daerah kota Langsa pada belanja tidak langsung mengeluarkan biaya yang besar, karena 77,73% dikeluarkan hanya untuk belanja gaji dan tunjangan. Kondisi keuangan daerah juga semakin kritis dan mengkhawatirkan yang disebabkan oleh perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD kota Langsa, yang menyatakan bahwa bengkaknya belanja pegawai ini dikarenakan pemerintah daerah telah menetapkan tunjangan gaji pegawai secara berkala serta adanya gaji ke-13, kemudian rekrutmen PNS secara terus menerus, selanjutnya jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.

Kemudian berikut ini dapat dilihat kontribusi belanja langsung terhadap belanja langsung Kota Langsa :

Tabel IV-36
Kontribusi Jenis Belanja Langsung Terhadap Belanja Langsung Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Belanja Langsung	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata
		Jumlah	%									
1	Belanja Pegawai	23.978.992.023	15,99%	50.950.779.288	21,31%	103.738.098.668	26,77%	65.674.557.910	15,59%	66.068.722.406	18,99%	19,73%
2	Belanja Barang dan Jasa	51.022.378.369	34,01%	68.610.678.567	28,69%	134.441.518.332	34,69%	181.152.329.292	42,99%	109.238.299.684	27,84%	33,64%
3	Belanja Modal	75.001.370.393	50,00%	119.561.457.856	50,00%	149.334.337.367	38,54%	174.548.981.891	41,42%	294.379.982.765	53,17%	46,63%
	Belanja Langsung	150.002.740.785	100%	239.122.915.711	100%	387.513.994.368	100%	421.375.849.093	100%	550.687.004.855	100%	100%

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jenis belanja langsung pada belanja modal memiliki rata-rata angka tertinggi jika dibandingkan dengan jenis belanja modal lainnya, yaitu sebesar 46,63% selama kurun waktu 5 tahun. Pada belanja langsung juga terdapat belanja pegawai sebesar 19,73% lebih sedikit jika dibandingkan dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Berikut ini adalah kontribusi jenis belanja modal terhadap belanja modal Kota Langsa :

Tabel IV-37

Kontribusi Jenis Belanja Modal Terhadap Belanja Modal Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016

No.	Jenis Belanja Modal	2012		2013		2014		2015		2016		Rata-rata	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belanja Modal Tanah	319.306.500	0,68%	1.011.490.000	1,38%	749.504.000	0,50%	3.250.303.727	1,86%	1.056.190.000	0,36%		0,99%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.267.492.669	21,82%	23.452.391.855	36,70%	32.888.745.176	22,02%	29.409.856.663	16,85%	49.193.368.516	16,71%		22,82%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.045.150.285	40,48%	18.072.220.783	28,29%	41.322.550.232	27,67%	51.350.370.332	23,42%	50.683.704.490	17,22%		27,42%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.904.159.500	31,68%	20.409.766.971	31,94%	71.242.107.979	47,71%	79.145.126.149	45,34%	180.300.348.109	61,25%		43,58%
5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	2.515.233.000	5,34%	946.018.000	1,48%	3.131.469.980	2,09%	962.769.850	0,55%	1.180.628.000	0,40%		1,97%
	Belanja Modal	47.051.341.954	100%	63.891.887.609	100%	149.334.337.367	100%	174.548.981.891	100%	294.379.982.765	100%		100%

Sumber : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya belanja modal yang dikeluarkan bersumber dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 43,58%. Tetapi dengan besarnya belanja modal yang dikeluarkan tentu dapat berdampak baik atau bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah kota Langsa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Kabag. Akuntansi dan Pelaporan BPKD kota Langsa, yang menyatakan bahwa meningkatnya belanja daerah setiap tahunnya disebabkan oleh banyaknya usulan atau kebutuhan masyarakat Kota Langsa dalam pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan. Contohnya seperti pembuatan taman di beberapa tempat umum, pembangunan pada hutan lindung, penggantian serta perawatan hutan bakau (*mangrove*), penerangan jalan, perbaikan jalan dan jembatan, sehingga belanja bisa bertambah dan disesuaikan dengan pendapatan yang ada, jika pendapatan itu bisa bertambah maka belanja juga akan bertambah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Langsa tahun 2012-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Langsa pada tahun anggaran 2012-2016 tergolong rendah, karena secara rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 12,59%, ini menunjukkan bahwa pola hubungan rasio kemandirian pada Pemerintah Daerah Kota Langsa tergolong Instrukturif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Sementara pada Rasio Ketergantungan Daerah tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 88,99%, ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota Langsa semakin tinggi terhadap penerimaan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pada Rasio Derajat desentralisasi tergolong kurang yaitu sebesar 11,01%, ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah kota Langsa kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kemudian kinerja pemerintah daerah Kota Langsa dengan menggunakan rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif yaitu sebesar 86,21%. Selanjutnya pada rasio efisiensi PAD

tergolong efisien yaitu sebesar 10,38%, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Langsa sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk pemungutan PAD. Pada rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa rata-rata belanja langsung lebih kecil yaitu sebesar 60,40% dari belanja tidak langsung sebesar 85,48%. Dari hasil perhitungan diperoleh angka *share* sebesar 11,20% dan *growth* sebesar 85,56%, posisi Kota Langsa berada pada kuadran II, yaitu *share* rendah dan *growth* tinggi. Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja.

2. Penyebab pendapatan daerah beberapa tahun belum mencapai target yang dianggarkan dikarenakan kontribusi pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah kota Langsa sangat rendah dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 11,00% dari jumlah pendapatan daerah. Rendahnya pendapatan asli daerah disebabkan oleh penerimaan pajak daerah rendah yaitu sebesar 14,63%. Pajak burung sarang walet yang potensinya besar mempunyai peranan sebesar 0,37% dari penerimaan pajak daerah.
3. Penyebab meningkatnya belanja daerah pada tahun anggaran 2012-2016 pada pemerintah daerah kota Langsa, dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 90,37%. Besarnya belanja pegawai bersumber dari belanja gaji dan tunjangan yaitu sebesar 77,73%. Kemudian meningkatnya belanja daerah setiap tahunnya juga disebabkan oleh belanja modal sebesar 46,63% yang bersumber dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 43,58% yang

disebabkan oleh banyaknya usulan atau kebutuhan masyarakat Kota Langsa dalam pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian dan peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kota Langsa diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PADnya dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang. Hal ini tidak hanya berdampak besar bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah daerah kota Langsa meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pada penerimaan pajak daerah, dan mengurangi ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan dan mampu menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang diharapkan agar pendapatan daerah Kota Langsa bisa mencapai targetnya.
3. Sebaiknya pemerintah daerah kota Langsa meminimalkan belanja daerah yang bersumber dari belanja pegawai dan lebih mengutamakan belanja yang dikeluarkan untuk membiayai program/kegiatan. Seperti kegiatan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pendapatan asli daerah kota Langsa dapat ditingkatkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas tempat penelitian meliputi NAD dan memperpanjang waktu penelitian menjadi 10 tahun, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau rasio lainnya, seperti menambahkan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- _____.(2008). *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri Umi Hanik. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)*. JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014.
- Anim Rahmayati. (2016). "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2011-2013".
- Astria Nabila Muhibtari. (2014). "Analisis Rasio Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012". TESIS
- Ihyahul Ulum. (2004). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Joko Pramono.(2014). *Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keungan pemerintah daerah. (studi kasus pada pemerintah kota surakarta)*.
- Listiyani Natalia. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE:Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mentari Yosephen Sijabat. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. JurnalAdministrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 .2013

Moito. (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.

Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.

Pemerintah Kota Langsa, Potensi Daerah Kota Langsa di akses dari <http://www.langsakota.go.id/>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*: Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Qanun Kota Langsa No. 1 tahun 2012 *tentang Retribusi jasa umum salah satunya mengatur adanya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.

_____. No. 5 tahun 2008 *tentang Pengelolaan dan pengusaha sarana burung walet*.

Sandy candra saputra, I wayan suwendra, Fridayana yudiatmaja. (2016). "*Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembrana tahun 2010-2014*".

Sopiah. (2017). "*Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2011-2015 menggunakan analisis rasio keuangan*". TESIS

UU. Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.

_____. Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pemerintah Daerah*.

Wachid. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik(2):2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi.

Nama : RiswitaMuliani
TempatdanTanggalLahir : Langsa, 03 Maret 1993
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Syiah Kuala Lr. Petua
Thaleb No. 30 Langsa
Anakke- : 3 (tiga)

Orang Tua.

Nama Ayah : H. Ri. Ismit Ismail, S.H.,
M.M
NamaIbu : Hj. Ratnawati, S.Pd

Pendidikan Formal.

1. SD Negeri 15 Langsa : 1999-2005
2. SMP Negeri 3 Langsa : 2005-2008
3. SMA Negeri 1 Langsa : 2008-2011
4. UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara : 2011-2015

Tahun 2016-2018 tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.